

HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana

Hukum Islam Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum

pada Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Alauddin Makassar



Oleh:

A.ZAQIAH SAUDI

NIM: 10400112025

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR


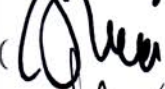




2016

PENGESAHAN SKRIPSI

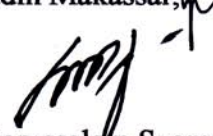
Skripsi yang berjudul, "Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Islam", yang disusun oleh A.Zaqiah Saudi, NIM 10400112025, mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 29 Agustus 2016 M, bertepatan dengan 26 Dzulqaidah 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 29 Agustus 2016 M
26 Dzulqaidah 1437 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.	()
Sekretaris	: Dr. Achmad Musyahid, M.Ag.	()
Munaqisy I	: Dr. H. Abd. Wahid Haddade, Lc., M.Hi.	()
Munaqisy II	: Irfan, S.Ag, M.Ag.	()
Pembimbing I	: Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.Ag.	()
Pembimbing II	: Zulhas'ari Mustafa, S.Ag, M.Ag.	()

Diketahui oleh:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Zaqiah Saudi
NIM : 10400112025
Tempat/tgl.Lahir : Sinjai, 25 Maret 1994
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Perumahan Bumi Samata Permai Blok G.3 No.12
Judul : Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak
Ditinjau Dari Hukum Islam.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S

Makassar, 21 Juli 2016

Penyusun



A.Zaqiah Saudi

NIM: 10400112025

Suryaningrath serta teman-teman KKNP UIN Angkatan VI Desa Jonjo Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa yang senantiasa menemani dan melewati suka duka bersama-sama.

8. Dan kepada teman-teman, sahabat, adik-adik di Fakultas Syariah dan Hukum terkhusus jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang tidak sempat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini, mohon dimaafkan. Dan kepada kalian diucapkan banyak terima kasih.

Akhirul kalam, disadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat beberapa ketidak sempurnaan sebagaimana idealnya suatu karya ilmiah. Oleh karena sumbangsih kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak merupakan penghargaan dan kehormatan bagi penulis. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.

Wassalam

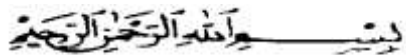
Makassar, 21 Juli 2016

Penyusun


A. Zaqiah Saudi

NIM: 10400112025

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين , وعلى آله وصحبه
اجمعين. أما بعد

Segala puji kehadiran Allah SWT dengan Rahmat dan Magfirah-Nya serta salawat serta salam teruntuk Nabi sepanjang zaman, Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari alam jahiliah menuju alam terang benderang. Atas Ridha-Nya dan doa yang disertai dengan usaha yang semaksimal setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Hukum Islam” Semoga kehadiran skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi semua pihak, baik dalam bentuk motivasi moril maupun materil. Karena itu, kemudian penulis berkewajiban untuk menyampaikan ucapan teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta khususnya kepada kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan Ayahanda A. Saudi Moeri S.pd dan Ibunda Almh. A.Marta S.pd M.M yang telah menjadi orangtua hebat sejagad raya, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas. Dan kepada Ibunda tersayang yang telah kembali menghadap Sang Khalik, ucapan yang tak terhitung saya ucapkan telah

melahirkan, membesarkan, merawat mulai dari kecil hingga saya berusia 21 tahun. Terima Kasih atas semuanya ibu, kasih sayang yang tiada tandingannya dan semua pengorbanan yang telah ibu lakukan. Serta saudara-saudara A. Dian Aulia Saudi S.Farm., Apt, A. Nur Aulia Saudi S.Psi, A. Baso Saudi S.pd, A. Arif Amrullah Saudi, A.Jauhara Siri Saudi yang selalu memberikan dorongan dan semangat. Seluruh keluarga besar tercinta yang selalu memberikan motivasi, bantuan moril dan materil serta do'a restu sejak awal melaksanakan studi sampai selesai.

Secara berturut-turut penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar. Serta para wakil Rektor beserta seluruh staf dan karyawan.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsudin, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Serta para wakil dekan beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Dr. Abdillah Mustari, M.Ag. selaku ketua dan Bapak Dr. Achmad Musyahid, M.Ag. selaku sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum serta stafnya atas izin pelayanan, kesempatan dan fasilitas yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. Abdillah Mustari, M.Ag. selaku Pembimbing I dan bapak Zulhas'ari Mustafa, S. Ag., M. Ag selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.
5. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu dan pelayanan yang berguna.
6. Seluruh Teman-teman mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Angkatan 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang setia membantu dalam suka dan duka.
7. Terima Kasih kepada sahabat-sahabatku Dwi Yunita, Suryati Andayani, Irsan, Ulil Amry, Muh.Ridwan, A. Niniek Paryati, Nurfahirah, A. Nuraimmah Amanah, Fauziah Maswah, Fadilah Annisa, A. Nining

Suryaningrath serta teman-teman KKNP UIN Angkatan VI Desa Jonjo Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa yang senantiasa menemani dan melewati suka duka bersama-sama.

8. Dan kepada teman-teman, sahabat, adik-adik di Fakultas Syariah dan Hukum terkhusus jursan Pebandingan Mazhab dan Hukum yang tidak sempat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini, mohon dimaafkan. Dan kepada kalian diucapkan banyak terima kasih.

Akhirul kalam, disadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat beberapa ketidak sempurnaan sebagaimana idealnya suatu karya ilmiah. Oleh karena sumbangsih kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak merupakan penghargaan dan kehormatan bagi penulis. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi penulis sendiri.



Wassalam

Makassar, 21 Juli 2016

Penyusun

A.Zaqiah Saudi

NIM: 10400112025

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv-vi
DAFTAR ISI	vii-viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix-xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1-18
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	12
E. Metodologi Penelitian	14
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
BAB II TINJAUAN UMUM HUKUMAN KEBIRI.....	19-35
A. Pengertian Kebiri	18
B. Cara Pelaksanaan Hukuman Kebiri	20
C. Efek yang Ditimbulkan Hukuman Kebiri	26
D. Upaya Penerapan Hukuman Kebiri di indonesia	27

BAB III KEJAHATAN SEKSUAL.....	36-53
A. Pengertian Kejahatan Seksual	36
B. Kejahatan Seksual di Indonesia	39
C. Dampak Kejahatan Seksual Terhadap Anak	44
D. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	50
 BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HUKUMAN	
 KEBIRI	54-67
A. Dasar Hukum	54
B. Pandangan Ulama dan Pakar	57
C. Telaah Rancangan Perppu Kebiri.....	63
D. Telaah Hukum Islam Terhadap Manfaat dan Mudharat Hukuman	
Kebiri	66
BAB V PENUTUP	68-69
A. Kesimpulan	68
B. Implikasi Penelitian	69
DAFTAR PUSTAKA	70-72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	73

ABSTRAK

Nama : A. Zaqiah Saudi

NIM : 10400112025

**Judul : HUKUMAN KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) untuk mengetahui apa itu hukuman kebiri, 2) untuk mengetahui alasan diberlakukannya hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan 3) untuk mengetahui cara pelaksanaan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan multidisipliner, pendekatan syar'i. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya pengumpulan data yang digunakan bersumber dari buku yang memiliki relevansi dengan sumber yang dibahas. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal, dan peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

Setelah mengadakan pembahasan tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, maka perlu ada upaya pencegahan sejak dini dari berbagai kalangan mulai dari keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara agar kejahatan seksual terhadap anak tidak terus meningkat. Pendidikan moral dan pendidikan seks dimulai dari lingkungan keluarga merupakan hal yang paling penting sebagai bekal bagi anak-anak agar dapat terhindar dari perbuatan asusila tersebut. Selain itu pemerintah perlu mengkaji ulang tentang pemberian hukuman tambahan yaitu perppu kebiri yang dinilai melanggar HAM dan tidak sesuai dengan syariat islam. Pihak yang setuju dengan hukuman kebiri beranggapan bahwa kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia sudah masuk kategori kejahatan luar biasa atau disebut *Extra Ordinary Crime* yang membutuhkan penanganan yang luar biasa pula. Sedangkan pihak yang tidak menyetujui hukuman kebiri berpendapat bahwa hukuman kebiri melanggar syariat islam sehingga diharamkan dengan tiga alasan yaitu 1) syariah Islam dengan tegas telah mengharamkan kebiri pada manusia, tanpa ada perbedaan pendapat (khilafiyah) di kalangan fuqaha, 2) syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku pedofilia yang melakukan tindakan pencabulan dan pemerkosaan sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan Syariah Islam itu, 3) dalam hal metode kebiri yang digunakan adalah metode injeksi kimia, yakni yang diinjeksikan adalah hormon estrogen, hukumnya juga haram dari sisi lain, karena mengakibatkan laki-laki yang dikebiri memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Padahal Islam telah mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh setiap bangsa adalah menciptakan kualitas manusia yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa. Semakin tingginya nilai sebuah peradaban dari masa ke masa tentunya mampu memberikan kemajuan bagi kehidupan manusia, namun tidak dapat dilupakan juga bahwa di sisi lain dari kemajuan yang ditimbulkan akan membawa dampak yang buruk terhadap manusia jika semuanya tidak ditempatkan tepat pada tempatnya. Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang biasa dan bersifat umum serta merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan zaman. Perkembangan tersebut membawa dampak yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat tersebut termasuk tuntunan hidup.

Dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, anak adalah salah satu objek penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum, baik itu dalam rumah tangga oleh orang tua maupun dalam masyarakat oleh oknum-oknum tertentu. Secara umum diakui bahwa kejahatan itu bisa datang dari keluarga yang penuh konflik dari lingkungan sekolah karena tuntutan guru dalam pencapaian prestasi, maupun dari lingkungan masyarakat luas. Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini

dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku.¹

Anak merupakan makhluk yang lemah dan mulia, yang keberadaannya adalah kuasa dari kehendak Allah SWT melalui proses penciptaan. Oleh karena itu, mereka harus diperlakukan secara berperikemanusiaan seperti diberi nafkah, baik dari segi fisik maupun rohani, sehingga nanti mereka tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia dan mampu bertanggungjawab.²

Akhir-akhir ini, tindak kejahatan terhadap anak semakin meningkat di Indonesia. Kejahatan seksual terhadap anak sebagai fakta yang tak terbantahkan lagi. Informasi atas kasus pelecehan, penganiayaan seksual, perkosaan, prostitusi anak, pelacuran anak, pedofilia, perdagangan anak dan pornografi anak sering (atau setidaknya pernah) terungkap terutama melalui pemberitaan media massa. Pembuktian yang sangat sederhana, pemberitaan media massa dua – tiga bulan terakhir. Kita akan menjumpai hampir setiap hari terjadi kasus kejahatan seksual dalam berbagai bentuknya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa pengaduan kasus kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun terus meningkat. Banyaknya kasus yang terungkap merambat setelah kasus pedofilia yang menimpa murid Jakarta International School (JIS) 2014 lalu. AK seorang siswa TK JIS dicabuli oleh dua orang guru TK JIS bernama Neil Bantleman dan Ferdinand Michael . Mereka dijerat pasal 80, 82 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang

¹Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Cet. I: Makassar; Alauddin University Press, 2012), h. 168-169.

²Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.27.

Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dengan denda minimal 60 juta rupiah dan maksimal 300 juta rupiah.

Kasus JIS sempat surut dari pandangan media saat di Sukabumi polisi menangkap pria berusia 24 tahun bernama Andri Sobari alias Emon yang menyodomi puluhan anak-anak di bawah umur yang korbannya mencapai 110 anak. Emon ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 82 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 292 KUHP tentang Pencabulan dan Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut. Sebelumnya, kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak banyak terungkap karena korban dan keluarganya tidak melaporkan kejadian itu kepada penegak hukum maupun KPAI. Alasan keluarga atau korban tidak melapor berbagai macam. Ada karena merasa malu, tetapi ada juga yang enggan melapor karena merasa tidak yakin laporannya akan diproses secara hukum.³

Media massa makin dihiasi oleh banyaknya tindak kejahatan seksual. Selain itu, tindakan asusila juga dilakukan seorang publik figure Saipul Jamil terhadap pelajar laki-laki berinisial DS 17 tahun. Tak hanya wanita dewasa, anak-anak perempuan maupun laki-laki yang masih di bawah umur pun turut menjadi korban. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang lain sebagai tempat berlindung. Berdasarkan catatan yang ada, tindak kejahatan seksual paling banyak dilakukan oleh orang dekat seperti *immediate family* (ayah, paman, atau kakak), tetangga, teman sekolah dan kekasih yang memiliki intensitas interaksi yang cukup

³Komisi Perlindungan Anak, “KPAI: “Kasus Kekerasan Terhadap Anak Semakin Meningkat”, *Situs Resmi KPAI*. www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-kekerasan-terhadap-anak-meningkat/#/ (10 Mei 2016).

sering dengan korban. Namun tak jarang tindakan tersebut dilakukan oleh orang asing bahkan oknum aparat.⁴

Di tahun 2016, kasus yang sangat memprihatinkan kembali terjadi pada anak di bawah umur berusia 14 tahun, bahkan pelaku kejahatan seksual juga dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Yuyun, siswi SMPN 5 Kecamatan Rejang Lebong Bengkulu, diperkosa oleh 14 pelaku pada 2 Mei 2016 lalu yang tidak lain adalah teman sekolahnya sendiri. 7 dari 14 pelaku berusia di bawah 18 tahun. Setelah diperkosa, ia lalu dibunuh dan jasadnya dibuang ke jurang untuk menghilangkan jejak. Peristiwa tersebut tentunya menjadi tamparan keras bagi semua pihak. Hal yang sangat memilukan dan mengerikan, apalagi pelakunya masih anak-anak di bawah umur. Fakta menyebutkan bahwa 4 diantara 14 pelaku pernah melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur sebelumnya, namun kasus mereka diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan kasus Yuyun menunjukkan lemahnya hukuman yang tidak mampu memberi efek jera terhadap pelaku.⁵

Kasus pemerkosaan yang diikuti dengan pembunuhan terhadap Yuyun melengkapi sejumlah kasus serupa yang terjadi sebelumnya di berbagai daerah. Komisi Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat, tahun 2015 terdapat 2.898 laporan kekerasan anak di berbagai daerah, 62% diantaranya korban kejahatan seksual. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya, 2.737 kasus dimana 52% diantaranya korban kejahatan seksual. Tahun ini bisa jadi angkanya semakin

⁴Komisi Perlindungan Anak, "KPAI: "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa", *Situs Resmi KPAI*. www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-kekerasan-terhadap-anak-meningkat/#/ (10 Mei 2016).

⁵Media Indonesia, "Kasus Yuyun Picu Kesadaran RUU Penghapusan Kekerasan Seksual", *Situs Resmi Media Indonesia*. <http://www.mediaindonesia.com/news/read/43682/yuyun-pdan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual/2016-05-03/> (10 Mei 2016).

meningkat. Kasus kejahatan seksual anak ibarat gunung es, kemungkinan data di lapangan jauh lebih tinggi karena tidak semua kejadian dilaporkan.⁶

Caffey (seorang radiologist) mendefinisikan, kejahatan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas.⁷

Salah satu kejahatan seksual yaitu pemerkosaan adalah tindakan keji dan biadab, apalagi bila diikuti dengan pembunuhan. Namun hukuman yang diberikan kepada para pelakunya selama ini dinilai belum setimpal dengan trauma dan nyawa para korban, sehingga belum memunculkan efek jera. Faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan perbuatan keji sangatlah kompleks karena disebabkan manusia adalah makhluk sosial yang saling berinteraksi antara satu dengan lainnya dalam ruang dan waktu yang tak terbatas. Kenyataan tersebut lebih diperburuk oleh aktifitas manusia yang terjerembab ke mitos seksual menyimpang hingga hamil banyak dilatarbelakangi oleh gaya pergaulan bebas dan salah asuh orang tua. Kurangnya iman, cenderung seseorang terjerumus pada tindakan kejahatan, tetapi bagi seseorang yang pengetahuan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai ajaran agamanya kuat, cenderung tidak berbuat jahat, apalagi yang berhubungan dengan perbuatan asusila.

Agama memegang peranan penting dalam kehidupan manusia. Hanya dengan agama seseorang akan dapat menahan diri terhadap setiap perbuatan yang merugikan

⁶Poskota News, “Kejahatan Seks Hantui Anak, Pemerintah dan DPR Abai”, *Situs resmi Poskota News*. <http://poskotanews.com/2016/05/06/kejahatan-seks-hantui-anak-pemerintah-dan-dpr-abai/> (11 Mei 2016).

⁷Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 28-29.

diri sendiri, orang lain dan masyarakat. Untuk itu, agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang menjadi kebutuhan spiritual. Norma yang terdapat didalamnya merupakan norma ketuhanan yang selalu mengajarkan kebenaran dan kebaikan serta segala sesuatu yang telah digariskan agama dan senantiasa membimbing manusia kearah yang benar. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, artinya agama hanya keyakinan dan lambang saja, maka ia tidak akan berarti sama sekali bahkan iman manusia akan menjadi lemah. Iman yang lemah cenderung mendorong seseorang melakukan perbuatan asusila karena kontrol sosialnya tidak kuat. Dengan demikian, perbuatan asusila dan perbuatan dosa besar hanya dilakukan oleh orang-orang yang kadar imannya lemah.⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Al Isra ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahannya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”⁹

Situasi memprihatinkan ini harus diputus melalui tindakan kongkret. Bukan sekedar mengutuk dan mengulang-ulang pernyataan keprihatinan. Salah satu cara yang dinilai efektif adalah menghukum berat pelakunya. Pemerintah perlu memperkuat regulasi untuk lebih memudahkan aparat penegak hukum memberikan hukuman terberat bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan.

Ibarat gunung es, kasus kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan ini diyakini lebih banyak yang tidak dilaporkan, dibanding ribuan kasus

⁸Hamzah hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Cet. I: Makassar;Alauddin University Press, 2012), h.

⁹Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 19890, H. 129.

yang diterima Komnas Perlindungan Anak dan Komnas Perempuan. Ini tentu sangat mencemaskan dan fakta ini sudah sepatutnya membangkitkan energi yang luar biasa dari Pemerintah, penegak hukum dan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusinya. Bersama-sama melakukan gerakan nyata dengan satu tujuan, memerangi kekerasan dan kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan di bumi Indonesia. Berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak telah diterbitkan. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diatur dengan jelas tentang perlindungan anak sampai kepada aturan sanksi pidana bagi yang melanggar hak anak. Dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara. Diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi salah satu langkah untuk memberikan perlindungan anak yang secara umum menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Penjatuhan pidana tersebut tentulah belum seimbang dengan dampak yang ditimbulkannya, yakni korban yang masih anak-anak tentu akan mengalami trauma yang berkepanjangan hingga dewasa bahkan seumur hidupnya.¹⁰

Kejahatan seksual merupakan *Extraordinry Crime* atau kejahatan luar biasa yang tentunya menjadi problematika bersama dan merupakan bencana moral yang sulit disembuhkan. Kejahatan seksual yang akhir-akhir ini marak terjadi menimbulkan kekhawatiran mendalam tentang masa depan anak-anak yang menjadi korban kejahatan tersebut. Kejahatan seksual akan merusak generasi muda penerus

¹⁰Danang Prabowo, "Indonesia Darurat Kejahatan Seksual", *Radio Republik Indonesia*, 4 Mei 2016.

bangsa. Mereka yang menjadi korban cenderung menjadi pelaku kejahatan ketika beranjak dewasa. Karena kejahatan seksual merupakan kejahatan yang luar biasa, maka penanganannya juga harus luar biasa. Pemerintah sedang bersiap untuk mengeluarkan kebijakan baru. Jaksa Agung Prasetyo mengatakan, pihaknya akan mempelajari kembali segala aturan hukum yang berlaku, yang arahnya nanti akan lebih mengefektifkan penanganan terhadap perkara kekerasan seksual terhadap anak. Menurut Jaksa Agung, di KUHP ada misalnya perkosaan dan sebagainya diancam hukumannya lebih berat. Bahkan, kalau perkosaan yang dilakukan terhadap anak disertai dengan pembunuhan dan sebagainya untuk menghilangkan jejak, tentunya tidak hanya tuduhannya pada perkiraannya tapi juga pada perbuatan pidana pembunuhannya. Sehingga bisa ada dakwaan secara kumulatif, dua tindakan pidana dilakukan sekaligus oleh pelaku. Salah satu hukuman yang dicanangkan oleh pemerintah untuk pemberatan bagi pelaku kejahatan seksual yaitu hukuman kebiri. Perrpu pengebirian saat ini hampir rampung digodok pemerintah.

Kebiri adalah suatu tindakan medis yang dilakukan untuk menghilangkan nafsu seksual seseorang baik secara fisik maupun hormonal. Metode kebiri terdiri dari dua macam yaitu, metode pembedahan atau fisik dan metode hormonal atau dengan cara suntik. Metode fisik dilakukan dengan cara memotong organ yang memproduksi testosteron yaitu testis. Akibatnya, laki-laki akan kehilangan gairah dan menjadi mandul permanen. Cara yang kedua adalah dengan menyuntikkan hormon yang menekan produksi testosteron dalam tubuh. Cara ini hanya akan menghentikan gairah seseorang dalam waktu yang tertentu atau mengebiri secara sementara.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa kepada VOA mengatakan, pemerintah Indonesia ingin memberikan perlindungan kepada anak-anak Indonesia

agar mereka tidak menjadi korban kejahatan seksual. Banyak negara di dunia ini yang sudah memberlakukan hukuman kebiri atas kejahatan seksual anak. Beberapa Negara bagian di Amerika Serikat dan Inggris sudah memberlakukan hukuman tersebut sejak 1960, Jerman, Denmark, Rusia, Korea Selatan serta Australia juga telah memberlakukan hukuman tersebut. Pemerintah masih mempertimbangkan bentuk hukuman kebiri tersebut, apakah akan mengikuti Jerman dengan melakukan bedah syaraf libido, atau mengikuti Inggris, Korea dan Australia dengan menyuntikkan zat hormon tertentu untuk menurunkan nafsu seksual atau bahkan sekarang bisa dengan kapsul. Hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual di Indonesia akan disesuaikan dengan tingkat kejahatannya, artinya pelaku bisa saja tidak dihukum kebiri secara permanen. Tetapi bagi pelaku kejahatan tingkat berat, hukuman kebiri dilakukan secara permanen.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang diatas, maka permasalahan pokok yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini yaitu bagaimana Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Menurut Hukum Islam. Pembahasan selanjutnya akan dirumuskan dalam beberapa sub masalah, adapun sub masalah yang penulis angkat adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan kebiri ?
2. Mengapa hukuman kebiri diperlukan bagi pelaku kejahatan seksual anak ?
3. Bagaimana hukuman kebiri dapat dilaksanakan terhadap pelaku kejahatan seksual anak ?

¹¹Fathiyah Wardah, "Pemerintah Masih Pertimbangkan Bentuk Hukuman Kebiri untuk Kejahatan Seksual Terhadap Anak", *Voice Of America*.
<http://www.voaindonesia.com/content/pemerintah-masih-pertimbangkan-bentuk-hukuman-kebiri/3031658.html> (18 April 2016).

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian

Adapun judul penelitian ini adalah Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam. Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap judul yang dimaksud, maka dijelaskan beberapa variabel sebagai berikut.

Adapun yang dimaksud dengan hukuman kebiri adalah (*al ikhsha, castration*) artinya adalah pemotongan dua buah dzakar (*al khushyatain, testis*), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (*dzakar*). Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Namun adakalanya kebiri berupa pemotongan testis dan penis sekaligus. Kebiri bertujuan menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul. Metode kebiri secara garis besar ada dua macam, yaitu metode fisik dan metode hormonal (injeksi). Metode fisik dilakukan dengan cara memotong organ yang memproduksi testosteron, yaitu testis. Setelah testis dipotong dan dibuang melalui operasi, sisanya diikat dan kemudian dijahit. Dengan pemotongan testis tersebut, berarti sudah dihilangkan testosteron sebagai hormon pembangkit gairah seks. Akibatnya laki-laki akan kehilangan gairah seks dan sekaligus menjadi mandul permanen. Adapun metode kebiri hormonal, dilakukan bukan dengan memotong testis atau penis, tapi dengan cara injeksi (suntikan) hormon kepada orang yang dikebiri. Ada dua metode injeksi. *Pertama*, diinjeksikan obat yang menekan produksi hormon testosteron. Injeksi dilakukan berulang-ulang sehingga hormon testosteron seolah-olah hilang. *Kedua*, diinjeksikan hormon estrogen kepada orang yang dikebiri, sehingga ia memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Hormon testosteron akan menurun dan gairah seksual juga akan ikut menurun.¹²

¹²Hizbut Tahrir Indonesia, "Pro Kontra Hukuman Kebiri Dalam Perspektif Syariah Islam", *Situs Resmi Hizbut Tahrir*. <http://hizbut-tahrir.or.id/2015/10/26/pro-kontra-hukuman-kebiri-dalam-perspektif-syariah-islam/> (24 April 2016).

Pelaku adalah catatan sejumlah nama atau hal (tentang kata-kata, nama orang, barang, dan sebagainya) yang disusun berderet dari atas ke bawah.

Kejahatan Seksual adalah apabila anak disiksa/ diperlakukan secara seksual dan juga terlibat atau ambil bahagian atau melihat aktivitas yang bersifat seks dengan tujuan pornografi, gerakan badan, film, atau sesuatu yang bertujuan memuaskan nafsu seksnya kepada orang lain.¹³

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴

Hukum Islam adalah aturan-aturan yang bersumber dari ajaran-ajaran islam yang biasa disepadangkan dengan istilah "syariat dan fiqh".¹⁵

Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu Hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak ditinjau dari hukum Islam.

Dengan demikian dari definisi operasional variabel dan ruang lingkup penelitian diatas maka yang dimaksud dengan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak ditinjau dari hukum Islam adalah (*al ikhsha, castration*) artinya adalah pemotongan dua buah dzakar (*al khushyatain, testis*), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (*dzakar*). Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah pengertian dasar dari kebiri. Namun adakalanya kebiri berupa pemotongan testis dan penis sekaligus. Kebiri bertujuan menghilangkan syahwat dan sekaligus menjadikan mandul. Metode kebiri secara garis besar ada dua macam, yaitu metode fisik dan metode hormonal (injeksi). Metode fisik dilakukan dengan cara memotong

¹³Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014),h.36.

¹⁴Pasal 1 KUHP Tentang Perlindungan Anak

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV (cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 363.

organ yang memproduksi testosteron, yaitu testis. Setelah testis dipotong dan dibuang melalui operasi, sisanya diikat dan kemudian dihajut. Dengan pemotongan testis tersebut, berarti sudah dihilangkan testosteron sebagai hormon pembangkit gairah seks. Akibatnya laki-laki akan kehilangan gairah seks dan sekaligus menjadi mandul permanen. Adapun metode kebiri hormonal, dilakukan bukan dengan memotong testis atau penis, tapi dengan cara injeksi (suntikan) hormon kepada orang yang dikebiri. Ada dua metode injeksi. *Pertama*, diinjeksikan obat yang menekan produksi hormon testosteron. Injeksi dilakukan berulang-ulang sehingga hormon testosteron seolah-olah hilang. *Kedua*, diinjeksikan hormon estrogen kepada orang yang dikebiri, sehingga ia memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Hormon testosteron akan menurun dan gairah seksual juga akan ikut menurun.

D. Kajian Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran tidak ditemukan hasil penelitian yang serupa dengan pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini, artinya masalah ini belum pernah diteliti sebelumnya.

Bagong Suyanto dalam bukunya masalah sosial anak. Buku ini menjelaskan bahwa kejahatan seksual anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual dan pelanggaran hak anak yang sangat memprihatinkan karena kasus pedofilia ini sudah memakan banyak korban. Faktor yang menyebabkan kenapa kejahatan seksual ini makin marak mengancam anak-anak adalah karena kurangnya kepedulian dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah serta ancaman hukuman yang sangat longgar yang tidak dapat memberi efek jera.

Hamzah Hasan dalam bukunya kejahatan kesusilaan perspektif hukum pidana islam. Buku ini menjelaskan bahwa Perbuatan cabul merupakan perbuatan melawan

hukum dalam arti bertentangan dengan norma agama dan norma masyarakat Indonesia. Perbuatan cabul merupakan segala perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelamin.

Abdul Rahman Kanang dalam bukunya hukum perlindungan anak dari eksploitasi seks komersial. Buku ini menjelaskan bahwa bentuk-bentuk dari praktik eksploitasi seks komersial terhadap anak meliputi semua praktik penyalahgunaan seks terhadap anak oleh orang dewasa dengan cara paksa, pemberian uang atau semacamnya kepada anak ataupun kepada pihak ketiga. Anak dijadikan sebagai objek seks serta objek komersial.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang Perlindungan anak. UU RI No.23 Tahun 2002 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Dengan demikian berdasarkan kajian pustaka diatas, tidak ditemukan persamaan judul antara hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak ditinjau dari hukum islam dengan referensi-referensi yang telah diangkat diatas, juga tidak ditemukan hasil penelitian yang serupa dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

E. Metodologi penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan dalam skripsi nanti maka peneliti akan menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (library research). Secara definitif, library research adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Sedangkan deskriptif adalah mendeskripsikan dan melukiskan realita sosial yang kompleks atau menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.¹⁶

Penelitian ini berupa telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan data informasi dari beberapa sumber data yang kemudian disajikan dengan cara baru dan untuk keperluan baru.

Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang Hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak ditinjau dari Hukum Islam dengan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, catatan dan lainnya.

¹⁶ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 40.

2. Metode pendekatan

Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian tentang hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak ditinjau dari Hukum Islam, maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan syari'i

Pendekatan ini adalah pendekatan hukum (syari'i), yakni menjelaskan hukum yang berhubungan dengan hukum Islam serta pendekatan yang dilakukan dengan jalan mempelajari dan menelaah ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke dalam penelitian perpustakaan (library research), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder:

a. Sumber primer

Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Misalnya buku Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Sumber sekunder

Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen atau data yang dikumpulkan oleh orang lain.¹⁷ Misalnya buku masalah sosial anak, buku kejahatan kesusilaan, buku psikologi sosial, internet (bisnis), dan buku yang terkait dengan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak.

4. Metode pengumpulan data

Dalam metode pengumpulan data nanti teknik yang akan digunakan yaitu:

- a. Kutipan langsung, yaitu peneliti mengutip pendapat atau tulisan orang secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa berubah. Misalnya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “anak merupakan amanah dan anugerah Allah SWT, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang utuh”.
- b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat orang lain dengan cara memformulasikan dalam susunan redaksi yang baru. Misalnya, apakah hukuman kebiri merupakan hukuman yang efektif diterapkan untuk pelaku kejahatan seksual anak.

5. Metode pengolahan data dan analisis

Metode pengolahan data nanti teknik yang akan digunakan yaitu:

- a. Metode komparatif yaitu, digunakan untuk membandingkan beberapa data dan memberikan gambaran secara jelas, sistematis, objektif serta kritis yang dijelaskan

¹⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), h. 93.

antara hukum Islam dan hukum positif mengenai fakta-fakta tentang permasalahan yang dibahas.

- b. Metode induktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum. Misalnya, inisiatif pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan pengganti Undang-Undang (perppu) menimbulkan pro-kontra diantara kalangan. Ada pihak yang menyetujui hal tersebut dengan alasan dapat memberikan efek jera dan disisi lain ada pihak yang tidak menyetujui karena menganggap hukuman tersebut tidak efektif dan tidak mampu memberikan efek jera bagi pelaku.
- c. Metode deduktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan.¹⁸ Misalnya, maraknya kejahatan seksual di Indonesia merupakan dampak negatif dari akses internet yang disalahgunakan. Anak-anak semakin bebas menonton film porno yang membuat agresifitas seksualnya meningkat dan membuatnya melakukan hal yang sama. Selain itu, minuman keras yang semakin mudah didapatkan juga merupakan penyebab semakin brutalnya kejahatan. Oleh karena itu, pemerintah terdesak untuk melakukan pemberatan hukuman bagi kejahatan seksual dengan merencanakan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (perppu).

F. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui apa itu hukuman kebiri.
 - b. Untuk mengetahui alasan hukuman kebiri diberlakukan pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak .

¹⁸ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, h. 144.

- c. Untuk mengetahui cara pelaksanaan hukuman kebiri pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
2. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Kegunaan Teoritis
 - b. Secara teoritis penulisan proposal ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum umumnya dan hukum Islam khususnya, sehingga dapat memberikan dorongan untuk mengkaji lebih kritis dan serius lagi mengenai berbagai permasalahan dalam dunia hukum, terutama hukum Islam dan hukum nasional, mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual anak ditinjau dalam undang-undang Perlindungan Anak.
 - c. Kegunaan Praktis
 - 1) Dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang apa itu hukuman kebiri.
 - 2) Dapat mengetahui alasan hukuman kebiri diberlakukan pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak.
 - 3) Dapat mengetahui cara hukuman kebiri dilaksanakan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUMAN KEBIRI

A. Pengertian Kebiri

Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.¹

Kebiri secara harfiah, artinya sudah dihilangkan (dikeluarkan) kelenjar testisnya (pada hewan jantan) atau dipotong ovariumnya (pada hewan betina), sudah dimandulkan artinya, para pelaku kejahatan yang dikenai hukum kebiri nantinya sudah hilang fungsi seksualnya. Baik jika ia laki laki, maka laki laki tersebut sudah tidak akan tertarik melihat lawan jenisnya.²

Kebiri atau yang disebut orchietomy adalah pengangkatan sebagian atau seluruh testis pria. Testis diketahui menghasilkan 95 persen hormon kejantanan atau testosterone.³

Kebiri (*al ikhsha, castration*), artinya adalah pemotongan dua buah dzakar (*al khushyatain, testis*), yang dapat dibarengi dengan pemotongan penis (*dzakar*). Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah pengertian dasar dari kebiri.⁴

¹Any Safary, “Pengertian Kebiri dan Hukumnya”, <http://sikpas.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-kebiri-dan-hukumannya.html> (19 Juli 2016).

²“Pengertian Kebiri” (Suara News), Go A Head Challenge (19 Juli 2016).

³Warta Informasi Berita (WartaInfo), “Hukuman Kebiri Kimia dan Fisik”. Situs Resmi WartaInfo. <https://www.wartainfo.com/2016/05/hukuman-kebiri-kimia-dan-fisik-serta-efeknya-itu-apa.html> (19 Juli 2016).

⁴Hizbut Tahrir Indonesia, “Pro Kontra Hukuman Kebiri Dalam Perspektif Syariah Islam”, Situs Resmi Hizbut Tahrir. <http://hizbut-tahrir.or.id/2015/10/26/pro-kontra-hukuman-kebiri-dalam-perspektif-syariah-islam/> (24 April 2016).

B. Cara Pelaksanaan Hukuman Kebiri

Dalam dunia kedokteran, terdapat berbagai metode kontrasepsi, dan kebiri merupakan salah satu diantaranya. Selain kontrasepsi pada wanita, kebiri merupakan salah satu bentuk kontrasepsi pria yang dapat dilakukan. Pengebirian dapat dilakukan dengan memotong bagian testis sehingga nafsu seksual berkurang. Selain itu, terdapat metode lain yang juga dapat dilakukan, yaitu dengan menyuntikkan hormon ke dalam tubuh pria. Hormon ini berfungsi untuk menekan nafsu seksual seseorang. Pengebirian ada yang bersifat permanen, dan ada juga yang bersifat sementara. Operasi merupakan salah satu bentuk metode kebiri yang bersifat permanen, sedangkan penggunaan hormon merupakan salah satu bentuk metode kebiri yang bersifat sementara, dan fungsi organ akan kembali normal jika masa kerja hormon sudah habis.

Ada dua macam teknik kebiri yang diterapkan, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan seksualnya. Kebiri kimiawi tidak dilakukan dengan mengamputasi testis, tetapi dengan cara memasukkan zat kimia antiandrogen ke tubuh seseorang supaya produksi hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya sama dengan kebiri fisik, yakni menghilangkan libido atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi. Hukuman kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan antiandrogen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga risiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Antiandrogen juga mengurangi massa otot sehingga memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak yang pada gilirannya

meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Berbeda dengan kebiri fisik, kebiri kimiawi tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat antiandrogen dihentikan, maka efeknya juga akan berhenti, dan pemerkosa akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual, maupun kemampuan ereksi.⁵

Seperti di Korea Selatan, hukuman kebiri dilakukan dengan kebiri kimia atau *chemical castration*. Pengebirian kimiawi secara luas dilakukan kepada semua pelaku kekerasan seksual untuk meningkatkan perlindungan warga dari kejahatan seksual di Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan akan menggunakannya hanya jika para ahli kesehatan memberi hasil pemeriksaan bahwa pelaku kejahatan seksual cenderung akan mengulangi perbuatannya. Prosedur kebiri kimia akan dilakukan setelah ada diagnosis dari psikiater dan kemudian pihak kejaksaan akan melakukan proses kebiri. Proses tersebut akan dilakukan dua bulan sebelum pelaku dibebaskan dari penjara dengan masa hukuman maksimal 15 tahun.⁶

Di Rusia, Undang-Undang tentang pedofilia telah disetujui sejak 2011. Pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah usia 14 tahun akan mendapat hukuman kebiri kimia. Caranya, pengadilan akan meminta laporan psikiater forensic untuk menindaklanjuti langkah medis terhadap pelaku. Pada saat yang sama, beberapa narapidana yang korbannya di atas 14 tahun juga ada yang sukarela dikebiri kimia. Setelah menjalani kebiri kimia, pelaku kejahatan seksual pedofilia akan menjalani

⁵Lily Turangan, "Dua Cara Hukuman Kebiri Dilakukan", Kompas.Com 19 Juli 2016. <http://health.kompas.com/read/2016/05/16/190700023/Dua.Cara.Hukum.Kebiri.Dilakukan> (19 Juli 2016).

⁶"Di Korea Selatan Pelaku Pemerkosa Dihukum Kebiri" Vemale.Com 25 Maret 2013. <http://www.vemale.com/ragam/21074-di-korea-selatan-pelaku-pemerkosa-dihukum-kebiri.html> (19 Juli 2016).

hukuman kurungan. Mereka baru bisa mengajukan bebas bersyarat setelah menjalani 80 persen masa hukuman.

Munculnya hukuman kebiri ini disebabkan semakin meningkatnya tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Rusia. Secara mengejutkan, lebih dari 1.300 anak-anak di Rusia menderita kekerasan seksual pada 2008 dan 5.233 kejahatan seksual non kekerasan. Menurut anggota parlemen Rusia, Anton Belyakov, Sebanyak 97 persen dari pelaku pedofilia ini mengulangi kejahatan yang sama setelah dibebaskan. Sebelumnya, hukuman terberat pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan remaja di Rusia berkisar 8 sampai 15 tahun. Rata-rata, mereka hanya dikenakan kurungan tiga hingga empat tahun saja. Prosedur kebiri kimia di Rusia dilakukan menggunakan obat depo provera yang berisi progesteron sintetis. Dengan menyuntikkan lebih banyak hormon wanita ke tubuh pria maka ini akan menurunkan hasrat seksual pria. Meski demikian, tetap ada efek samping dari kebiri kimia ini, seperti depresi, kelelahan, diabetes, dan pembekuan darah.⁷

Di Jerman, hukuman kebiri enggan dihapuskan oleh pemerintah Jerman meskipun telah mendapatkan teguran keras dari Komite Anti Penyiksaan Dewan Eropa (CPT). Menurut mereka, bedah kebiri sangat membantu para pelaku kejahatan yang memiliki kelainan hasrat seksual. Ini penyakit yang harus diatasi, jika tidak ingin kejahatan seksual yang dilakukannya semakin parah. Pemerintahan Berlin bersikeras, hukuman ini ampuh. Mereka mengklaim, dari 104 orang yang dikebiri sejak tahun 70an, hanya 3 orang yang kembali melakukan kejahatan seksual. Hampir setengahnya dari 53 yang menolak dikebiri, kembali melakukan kejahatan dalam

⁷Mutia Ramadhani, "Begini Cara Rusia Terapkan Kebiri Kimia untuk Pedofil", *Republika Online* 13 Oktober 2015. <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/10/13/nw4z3e328-begini-cara-rusia-terapkan-kebiri-kimia-untuk-pedofil> (19 Juli 2016).

kurun waktu dua tahun. Setiap tahunnya, hanya 5 tersangka yang menyatakan bersedia dikebiri di Jerman. Hukuman pengebirian di Jerman dilakukan secara sukarela oleh para pelaku kejahatan seksual. Tentu saja, mereka yang dikebiri akan mendapatkan keringanan hukuman. Mereka yang dikebiri harus berusia di atas 25 tahun. Pengebirian juga dilakukan oleh para ahli. Jerman bersikeras bahwa tindakan ini bukanlah sebuah hukuman, melainkan pilihan yang bisa saja tidak diambil seseorang.

Hukuman ini berasal dari pemerintahan Kekaisaran ketiga Jerman di bawah kepemimpinan diktator Adolf Hitler. Saat itu, ribuan pelaku kejahatan seksual dikebiri dengan paksa. Nazi Jerman juga melakukan berbagai percobaan konsentrasi untuk mencari cara lebih cepat dan murah melakukan pengebirian. Mereka yang dikebiri adalah para penjahat seksual yang sering keluar masuk penjara akibat kejahatan yang sama, atau pemerkosa banyak wanita. Selain Jerman, negara lainnya di Eropa yang juga menerapkan bedah kebiri adalah Ceko. Kritikan dan hujatan kepada negara ini juga tidak mampu membuat hukuman kebiri dihapuskan.

Sama halnya dengan Amerika Serikat yang menemukan cara untuk melakukan pengebirian, yaitu menggunakan bahan kimia. Sejak tahun 1960an, Amerika Serikat melakukan pengebirian kepada para pemerkosa dengan kebiri kimia. Dengan menyuntikkan Depo-Provera, sebuah bahan sintetis hormon progesteron, akan mampu mengendalikan hormon testosterone pada pria walaupun tidak mencegah testis memproduksi.⁸

⁸Denny Armandhanu, "Kebiri dan Pelaku Kejahatan Seksual di Eropa", Viva.co.id 24 Februari 2012. <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/291118-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-di-eropa>. (19 Juli 2016).

Meskipun beberapa negara tersebut di atas sudah memasukkan pasal hukuman atau tindakan/perawatan kebiri dalam hukum pidana mereka, namun dalam banyak kajian, ternyata sulit menerapkannya. Hukum acara yang mengatur mekanisme penerapan pasal tersebut mengalami kesulitan, karena harus melakukan diagnosa lebih dahulu sebelum menerapkannya, karena tidak semua pelaku harus dikebiri, tetapi harus dicek dan diagnosa lebih dahulu kesehatannya dan implikasi medisnya.

Di beberapa Negara Bagian Amerika Serikat seperti Louisiana dan Iowa telah mengadopsi kebiri sebagai bagian dari *treatment* dan bukan *punishment*. Di Amerika Serikat sendiri telah menjadi debat panjang tentang kebiri ini sejak tahun 1980 bahkan jauh di era sebelumnya. Penyuntikan cairan kimia kepada pelaku kejahatan seksual anak dalam bentuk *medroxy progesterone acetate* (MPA) diyakini akan menurunkan level testoren yang berimplikasi pada menurunnya hasrat seksual. Namun pemberian MPA pada pelaku kejahatan seksual anak ditolak oleh The Food and Drug Administration, alasan yang dikemukakan oleh institusi ini adalah untuk mengurangi hasrat seksual ini, maka pelaku kejahatan seksual anak harus disuntik *chemical castration* dengan dosis 500 miligram dan diberikan setiap minggu dalam jangka waktu tertentu hingga mengakibatkan pelaku *impotent*. Menurut institusi ini, tidak perlu membuat pelaku kejahatan seksual anak impoten, disamping itu, suntikan MPA ini dapat mengakibatkan terganggunya fungsi organ reproduksi pada pelaku disamping itu juga akan menimbulkan problem yang lebih serius yang sulit diprediksi sebagai implikasi dari suntikan MPA ini.

Pendapat lain mengatakan bahwa, injeksi *chemical castration* seolah-olah injeksi medis akan menjadi jalan keluar untuk memberikan hukuman bagi pelaku

kejahatan di masa depan setelah ditemukannya cairan suntikan mati untuk mengeksekusi pelaku kejahatan setelah divonis oleh pengadilan. Dan sekarang muncul cairan injeksi untuk menghukum pelaku kekerasan seksual anak. Temuan medis ini dianggap memberikan jalan keluar dalam menghukum pelaku kejahatan. Namun banyak ilmuwan berpendapat bahwa *chemical castration* ini lebih didominasi pada motivasi kampanye retorika bagi kepentingan politik. Karena jika diterapkan sebagai *punishment* bertentangan dengan konstitusi karena hukuman ini dinilai mengandung elemen barbarisme dan hukuman yang diadopsi oleh masyarakat primitif. Pengadilan memutuskan untuk menerapkan kepada pelaku kejahatan seksual anak yang paling serius dan memerintahkan untuk memberikan *treatment* kebiri. Namun persyaratan untuk memberikan *treatment* ini sangatlah ketat, karena ternyata hasil penelitian medis menemukan efek samping atas *treatment* ini diantaranya: menimbulkan ketagihan/kecanduan, migran, sakit kepala yang berkepanjangan dan bahkan dapat menimbulkan diabetes. Meskipun efek samping ini masih menjadi perdebatan, namun kalangan medis disana sepakat akan timbul efek samping jika suntikan ini dihentikan.

Meskipun demikian, kebijakan Negara bagian yang menerapkan kebiri ini mendapatkan kritik yang luar biasa bukan saja dari tenaga medis tetapi juga para ahli hukum dan kriminolog. Ryan Cauley dari Universitas Iowa mengatakan bahwa, meskipun kebiri dapat *treatment*, namun tetap saja pelaku menilainya sebagai *punishment*. Menurutnya, kebiri kimiawi (*chemical castration*) memiliki banyak persoalan hukum, tidak saja dari sisi hukum materiilnya tetapi juga menyangkut juga terkait dengan *procedural law*-nya. Secara akademik dia juga mengutip pandangan para kriminolog bahwa yang menjadi pemicu kejahatan seksual adalah faktor “*power and violence*” dan bukan faktor “*sexual desire*” atau hasrat seksual. Karena itu, yang

harus dikurangi adalah motivasi kekerasannya daripada motivasi hasrat seksualnya. Menurutnya, yang paling tepat untuk diberikan kepada pelaku kejahatan seksual anak ini adalah *therapy* dan bukan *treatment* berupa suntikan kimia kebiri. *Therapy* psikologi akan banyak membantu pelaku kejahatan seksual anak karena yang dihadapi pelaku adalah apa yang disebutnya dengan “*psychological problem*” bukan “*medical problem*”. Dengan melakukan “*psychological treatment*”, maka akan mengurangi dampak pada ketergantungan obat dan akan menghilangkan efek negatif dari kebiri kimiawi.⁹

C. Efek yang Ditimbulkan Hukuman Kebiri

Kebiri atau kastrasi memang dapat menurunkan dorongan seksual pada pelaku kejahatan seksual, namun demikian jika dilakukan pengebirian dengan penghilangan testis, maka akan menghilangkan organ secara permanen. Di samping itu walaupun akan turun secara drastis dorongan seksualnya, masih dapat kembali, karena masih ada faktor-faktor psikologis yang dapat menimbulkan kembali dorongan seksual. Pengebirian juga dapat menimbulkan kemungkinan pelaku menjadi lebih agresif karena faktor psikologis dan sosial, perasaan negatif, seperti sakit hati, marah, dan dendam, sudah terbentuk sejak pelaku merasakan viktimisasi pada dirinya. Walaupun secara medis memberi dampak penurunan dorongan seksual, namun harus dikaji secara mendalam dampak sosial dan psikologis pada pelaku yang dikebiri sehingga diperlukan pendampingan psikologis dan sosial terhadap pelaku selama dan setelah menjalani masa hukumannya.

Faktor pendorong timbulnya kejahatan seksual sangat bervariasi. Faktor mana yang paling dominan untuk dapat dijadikan pedoman untuk memberikan *treatment*

⁹Institute For Criminal Justice Reform, “Menguji Euforia Kebiri”, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/03/Menguji-Euforia-Kebiri.pdf>. (26 April 2016).

yang tepat belum dapat ditemukan secara ilmiah. Kesulitan menemukan faktor pencetus dan *treatment* yang tepat terhadap pelaku kejahatan seksual adalah kesulitan metodologis yang harus menerapkan desain eksperimental. Sampel hanya terbatas pada pelaku yang sedang menjalani hukuman. Pembagian sampel ke dalam kelompok *treatment* dan kontrol masih terhambat oleh rambu-rambu etika penelitian. Namun demikian untuk memperlakukan pelaku kejahatan seksual dan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat, tidak boleh hanya didasari oleh pertimbangan emosional, *common sense*, pencitraan, melayani tuntutan publik yang lebih banyak merupakan pertimbangan emosional. Bagi ilmuwan, setiap pertimbangan atau rekomendasi harus didasarkan pertimbangan ilmiah yang ditandai adanya kesesuaian antara gagasan dengan fakta dan sekaligus merupakan pelaksanaan amanah konsitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁰

D. Upaya Penerapan Hukuman Kebiri di Indonesia

Wacana pelaksanaan hukuman kebiri di Indonesia, menimbulkan pro kontra diberbagai kalangan. Pihak yang menyetujui hukuman kebiri beranggapan bahwa hukuman kebiri dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Sedangkan pihak yang tidak setuju beranggapan bahwa hukuman kebiri merupakan bentuk penyiksaan dan melanggar HAM.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise menilai kasus kejahatan seksual merupakan fenomena gunung es. Banyak hal yang terselubung yang susah untuk dikeluarkan atau diumumkan ke publik. Kebanyakan pelaku merupakan korban-korban kejahatan seksual yang kemudian menjadi pelaku.

¹⁰Institute For Criminal Justice Reform, “Menguji Euforia Kebiri”, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/03/Menguji-Eforia-Kebiri.pdf>. (20 Juli 2016).

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa menyatakan bahwa Presiden sangat serius menanggapi kejahatan seksual yang semakin marak terjadi dan memerintahkan setiap kementerian lembaga untuk melakukan langkah-langkah antisipatif dari apa yang pernah terjadi maupun kedepannya. Hal yang terkait dengan perlindungan anak sangat banyak. Bagaimana tanggung jawab orang tua, yang dalam hal UU Perlindungan anak menyebutkan bahwa tanggung jawab utama ada di tangan orang tua. Kemudian struktur di bawahnya, ada regulasi tetapi ada struktur yang harus bisa memberikan support terhadap upaya perlindungan anak.¹¹

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Asrorun Niam, hukuman kebiri merupakan bagian dari ikhtiar untuk menjawab satu diantara sekian masalah yang menyebabkan keberulangan tindak kejahatan seksual terutama terhadap anak. Tentu dari pihak KPAI tidak mengatakan bahwa dengan pemberatan hukuman salah satunya hukuman kebiri mampu menyelesaikan dengan tuntas masalah. Karena ada berbagai variabel yang menjadi penyebab terjadinya tindak kejahatan seksual terhadap anak. Tetapi salah satunya adalah belum adanya mekanisme hukum yang cukup menjerakan. Dalam rapat terbatas 20 Oktober lalu, jawaban dari permasalahan tindak kejahatan seksual yaitu dengan pemberatan hukuman termasuk hukuman pengembirian. Dalam menentukan langkah-langkah atau solusi, terlebih dahulu harus memperhatikan kondisi riil yang dihadapi masyarakat. Dan kondisi riil yang terjadi pada masyarakat sekarang yaitu membutuhkan perlindungan hukum terhadap anak, khususnya terkait dengan kejahatan seksual. Maka harus ada mekanisme mulai dari hulu hingga hilir. Kebijakan pemberatan hukuman berupa kebiri penyelesaiannya bersifat hilir pasca terjadinya. Tujuannya untuk memberikan efek jera. Seperti dalam

¹¹“Darurat Kejahatan Seksual Remaja & Anak: Prime News” (Liputan), 20 April 2016.

ilmu hukum, ada pendekatan retributive yaitu memberikan pembalasan, jangan sampai atas nama kemanusiaan, pelaku tidak mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya yang akan membuatnya mengulangi perbuatannya lagi.

Ketua Komnas Perlindungan Arist Merdeka Sirait, melihat dari perspektif korban. Anak terpaksa meninggal dunia dengan begitu keji diawali dengan kejahatan seksual yang amat luar biasa dan dilakukan oleh orang dewasa yang sadar betul bahwa anak tidak mampu membela dirinya. Oleh karena itu, kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang luar biasa yang memerlukan hukuman yang luar biasa pula. Perrpu dianggap sangat penting karena situasi yang genting, sudah memaksa dan mendesak karena kejahatan seksual terhadap anak sudah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau disebut *Extra Ordinary Crime*. Oleh karena itu hukuman kebiri salah satu hukuman yang dapat memberikan efek jera. Melihat perspektif korban, korban tidak mampu membela dirinya karena masih di bawah umur. Ketika sang anak tidak mampu membela dirinya tetapi ia mengalami kekerasan yang sangat luar biasa bahkan hingga pembunuhan, itu bukan hanya merupakan kejahatan kemanusiaan tetapi sudah menjadi *Extra Ordinary Crime*, oleh karena itu kebiri patut dijadikan hukuman tambahan melihat dari perspektif korban dan dapat memberikan keadilan bagi korban. Hukuman pemberatan ada karena UU Perlindungan Anak tidak cukup memberikan sanksi hukum yang berkeadilan bagi korban. Kondisi anak di Indonesia membutuhkan pertolongan semua pihak dan membutuhkan hukuman tambahan untuk memberantas kejahatan yang sangat luar biasa. Kekerasan terhadap anak dalam bentuk apapun merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).¹²

¹²“Kebiri Menanti Predator Anak: Debat Pro Kontra Hukuman Kebii Penjahat Anak” (Liputan), 20 April 2016.

Anggota Komnas HAM Natalius Pigai, korban dilanggar haknya, begitupula dengan pelaku dilanggar haknya jika kebiri diberlakukan. Indonesia sudah masuk darurat kejahatan seksual terhadap anak. Perkembangan pengaduan yang diterima oleh lembaga perlindungan anak dari tahun ketahun semakin meningkat. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami keadaan darurat. Perlindungan hukum terhadap anak sudah sangat lengkap. Suatu Negara yang berorientasi penegakan, penindakan, menunjukkan Negara itu lemah, lemah membangun, lemah mengantisipasi. Kalau Negara menerapkan hukuman mati maupun kebiri, Negara menunjukkan kelemahannya. Tindakan hukuman mati maupun kebiri menunjukkan hukuman-hukuman jahiliyah. Hukuman kebiri adalah sebuah bentuk penyiksaan. Penyiksaan secara fisik dan penyiksaan kejiwaan.¹³

Beberapa organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) juga telah menyatakan keprihatinan dengan kegagalan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan kekerasan seksual pada anak. Menurut mereka, penanganan korban kejahatan seksual memerlukan penanganan yang multi dimensi dan tidak boleh hanya mengandalkan penanganan melalui penegakan hukum utamanya penegakan hukum pidana. Organisasi-organisasi tersebut setuju bahwa harus ada sistem yang sinergis dan holistic baik preventif maupun penanggulangan yang efektif untuk mengatasi persoalan kejahatan seksual anak. Penolakan dari organisasi-organisasi HAM pada dasarnya bersandar pada beberapa alasan yaitu;

- 1) Hukuman kebiri tidak dibenarkan dalam sistem hukum pidana nasional atau tujuan pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia.

¹³“Kebiri Menanti Predator Anak: Debat Pro Kontra Hukuman Kebii Penjahat Anak” (Liputan), 20 April 2016.

- 2) Hukuman kebiri melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang di berbagai konvensi internasional yang telah diratifikasi dalam hukum nasional kita, diantaranya Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak Sipil/ICCPR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), dan juga Konvensi Hak Anak (CRC), penghukuman badan, dalam bentuk apapun harus dimaknai sebagai bentuk penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia, terlebih apabila ditujukan untuk pembalasan dengan alasan utama efek jera yang diragukan secara ilmiah.
- 3) Segala bentuk kekerasan pada anak termasuk kekerasan seksual, pada dasarnya merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi terhadap anak. Dengan demikian, hukum kebiri tidak dapat menghentikan akar permasalahan kekerasan terhadap anak. Karena itu, organisasi-organisasi tersebut meminta agar pemerintah fokus pada kepentingan anak secara komperhensif, dalam hal ini sebagai korban. Negara harus memastikan korban mendapatkan perlindungan serta akses pada pemulihan fisik dan mental, maupun tindakan lainnya yang menitikberatkan pada kepentingan anak korban.

Psikolog Klinis Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI), Kristi Poerwandari juga menilai, hukuman kebiri berpotensi salah arah. Menurut dia, hukuman tersebut hanya akan memunculkan asumsi di masyarakat bahwa, tidak ada yang perlu dibenahi dari ideologi atau cara hidup dalam masyarakat. Hukuman tersebut hanya akan membentuk anggapan di masyarakat bahwa kekerasan seksual 100 persen terjadi karena alat kelamin pelaku. Dengan demikian masyarakat tidak memiliki andil apa pun menciptakan manusia agresif tersebut. Jadi, sebenarnya pelaku itu dari semua karakteristik bisa siapa saja. Sangat bervariasi dan pelakunya

sangat heterogen. Hukuman kebiri justru akan menciptakan pengkotak-kotakkan di masyarakat antara pelaku dan kita.¹⁴

Pemerhati anak Seto Mulyadi, meminta pemerintah untuk mengkaji ulang wacana memberikan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Hal ini menyangkut dampak yang terjadi bila hukuman kebiri ini jadi diterapkan. Hukuman kebiri dikhawatirkan hanya melumpuhkan syaraf libido pelaku saja, tapi tidak melumpuhkan sisi kekejamannya terhadap anak-anak. Padahal yang diperlukan adalah efek jera agar pelaku tidak mengulangi lagi kekejamannya terhadap anak-anak di masa mendatang. Kalau hanya untuk mengurangi dorongan seksual tanpa mengurangi dorongan untuk berlaku kejam terhadap anak-anak maka akan sia-sia. Hukuman kebiri harus dikaji ulang dampaknya. Apakah meningkatkan agresivitas atau justru mengakibatkan lebih banyak korban.¹⁵

Sosiolog Imam B.Prasodjo, menganggap hukuman kebiri tak memberikan efek jera. Solusi paling efektif adalah membangun kesigapan sosial dimana masyarakat harus waspada mengawasi gejala-gejala yang muncul. Pihak lainnya yang tidak setuju dengan hukuman kebiri yaitu tokoh ormas islam dan kalangan pesantren. Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Syamsul Anwar, tidak sepakat dengan hukuman kebiri jika mengubah fisik manusia. Ketua Asosiasi Pondok Pesantren Jawa Timur, Gus Reza Ahmad Zahid menyatakan tak selayaknya pemerintah menerapkan hukuman kebiri karena konsep islam tidak mengenal kebiri.

Pakar seksiologi dr. Boyke Dian Nugraha menilai, hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak-anak tidaklah efektif. Alasannya, pelaku

¹⁴Institute For Criminal Justice Reform, “Menguji Euforia Kebiri”, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/03/Menguji-Eforia-Kebiri.pdf>. (26 April 2016).

¹⁵“Hukuman Kebiri di Mata Kak Seto” (Liputan), Republika, 31 Oktober 2015.

kejahatan seksual pada anak masih berpotensi melakukan aksi kejahatannya selama kondisi mentalnya tidak diobati. Yang sakit jiwanya, kastrasi atau kebiri tidak akan menyelesaikan permasalahan jiwanya. Cara terbaik dengan memberikan pengobatan dan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan seksual.¹⁶

Dokter Spesialis Neurologi, Roslan Yusni Hasan menjelaskan bahwa kebiri kimia bertujuan menurunkan libido atau gairah seksual seseorang. Caranya dengan menyuntikkan hormone. Ada banyak jenis bahan kimia yang bisa dipakai. Namun, hormone yang banyak tersedia dan pada umumnya digunakan adalah Depo-Provera. Depo-Provera adalah obat KB yang sudah biasa dipakai perempuan, tapi digunakan laki-laki untuk menurunkan libido. Cara menyuntikkannya pun sama dengan suntik KB. Misalnya di bagian lengan, paha dan bokong. Dampaknya pun sama dengan KB, bergantung pada pemakaiannya. Pengaruhnya ada enam bulan atau dua bulan. Obatnya bekerja tidak sampai seumur hidup. Efek pemberian suntikan kebiri adalah membuat hormon seseorang tidak normal. Hormonal tidak seimbang, kerja otak terganggu, kerja tubuh juga terganggu. Hormonal terapi diberikan jika seseorang memang kekurangan hormone sesuai hasil pemeriksaan medis. Fungsinya untuk menormalkan hormone. Misalnya, orang yang merasa sakit karena estrogennya rendah diberi hormone estrogen. Sedangkan orang gelisah akibat hormone testosteronnya rendah ditambahkan testosterone. Kebiri kimia berbahaya bagi kesehatan karena menyakiti seseorang. Selain itu, kebiri kimiawi menimbulkan efek negatif berupa penuaan dini pada tubuh. Cairan anti-androgen diketahui akan mengurangi kepadatan tulang sehingga resiko tulang keropos atau osteoporosis meningkat. Anti-androgen juga mengurangi massa otot, yang memperbesar

¹⁶ “Soal Pro-Kontra Hukum Kebiri” (Liputan), Republika, 30 Oktober 2015.

kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah. Kebiri kimiawi tidak bersifat permanen. Artinya, jika pemberian zat anti-androgen dihentikan, efeknya juga akan berhenti dan pemeriksa akan mendapatkan lagi fungsi seksualnya, baik berupa hasrat seksual maupun kemampuan ereksi.¹⁷

Upaya penerapan hukuman kebiri menimbulkan banyak tuduhan dari masyarakat bahwa pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dengan menerapkan hukuman kebiri. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Sujatmiko memberikan penjelasan terkait polemik yang timbul di masyarakat. Perppu akan diterapkan dengan tetap memperhatikan koridor hukum, termasuk penghormatan terhadap HAM, baik pelaku maupun korban. Perppu sangat diperlukan untuk melindungi para korban yang merupakan kelompok rentan, perempuan dan anak. Hukuman kebiri tidak akan diterapkan kepada pelaku yang masih anak-anak, namun diberikan kepada pelaku yang sudah dewasa. Hukuman kebiri akan diberikan melalui suntikan kimia disertai dengan proses rehabilitasi. Proses rehabilitasi untuk menjaga pelaku tidak mengalami efek negatif lain selain penurunan libido. Suntikan kimia sifatnya tidak permanen dan hanya menimbulkan efek tiga bulan. Oleh karena itu, suntikan kimia akan diberikan secara berkala kepada pelaku melalui pengawasan ketat oleh ahli jiwa dan ahli kesehatan. Pengawasan bertujuan untuk memonitor pelaku, jangan sampai pelaku mengalami dampak negatif

¹⁷Rezki Alvionitasari, "Hukuman Kebiri Kimia, Begini Cara Kerja dan Dampaknya", *Tempo.co* 27 Mei 2016, http://googleweblight.com/?lite_url=https://m.tempo.co/read/news/2016/05/27/063334519/hukuman-kebiri-kimia-begini-cara-kerja-dan-dampaknya&ei=Lj eHxPk&Ic=id-ID&s=1&m=454&host=www.google.co.id&ts (20 Juli 2016).

lain selain penurunan libido. Hukuman kebiri bukan berarti memotong alat vital pelaku. Tidak permanen dan pelaku akan terus dipantau. Kebiri juga disertai rehabilitasi.¹⁸



¹⁸Kristian Erdianto, “Bagaimana Penerapan Hukuman Kebiri”, *Kompas.com* 26 Mei 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/26/18093221/bagaimana.penerapan.hukuman.kebiri.ini.penjelasan.pemerintah> (20 Juli).

BAB III

KEJAHATAN SEKSUAL

A. Pengertian Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual anak adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.¹

Secara teoritis, kejahatan terhadap anak didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental, atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.

Caffey (seorang radiologist) mendefinisikan, kejahatan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksualitas.²

Kejahatan seksual terhadap anak didefinisikan sebagai hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seseorang yang lebih tua atau anak yang lebih tinggi nalarnya, atau orang dewasa seperti orang tidak dikenal, saudara kandung atau orang tua anak itu sendiri.³

¹Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 173.

²Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 28-29.

³Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial*, h.39.

Kejahatan seksual sesungguhnya bukan sekedar bentuk pelanggaran hukum terhadap hak orang lain yang tergolong tindak kriminal. Tetapi lebih dari itu, ia adalah sebuah peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan karena dilatarbelakangi oleh nilai sosial budaya di masyarakat yang sedikit banyak bias gender.⁴

Menurut Encyclopedia of Feminism yang dikutip Marzuki Umar Sa'abah, kejahatan seksual adalah bentuk komentar verbal, gerakan isyarat sampai kontak fisik yang dilakukan dengan sengaja secara berulang-ulang, yang tidak dapat diterima oleh penderita. Wujud perbuatan ini dapat berupa siulan nakal, gurauan atau olok-olok seks, nyolek, mencubit, mencium, memperlihatkan gambar porno, mencoba memperkosa dan lain-lain.⁵

Menurut CASAT Programme Child Development Institute, secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.

Menurut Heise, kekerasan seksual adalah tindakan kekerasan verbal atau fisik, pemaksaan atau ancaman pada nyawa yang diarahkan pada seorang perempuan, apakah masih anak-anak atau sudah dewasa yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis, penghinaan, atau perampasan kebebasan.

⁴Bagong Suyanto, Masalah Sosial, h. 248.

⁵Kamsinah, Problematika Remaja & Pendidikan Seksual, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 38.

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan di Nairobi mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.⁶

Menurut Lyness, kejahatan seksual terhadap anak meliputi tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media/ benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya.

Menurut Ricard J.Gelles, kejahatan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial.

Kejahatan seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional, merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai

⁶Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, h. 249.

korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan maupun pencabulan.

Kekerasan seksual terhadap anak adalah apabila seseorang menggunakan anak untuk mendapatkan kenikmatan atau kepuasan seksual. Tidak terbatas pada hubungan seks saja, tetapi juga tindakan-tindakan yang mengarah kepada aktivitas seksual terhadap anak-anak, seperti: menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak, segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh, membuat atau memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual, secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain, membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh, serta memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.⁷

B. Kejahatan Seksual di Indonesia

Saat ini, Indonesia masuk ke dalam kategori darurat kejahatan seksual. Pada tahun 2014 lalu AK siswa TK JIS dicabuli oleh dua orang guru JIS. Kemudian kasus Andri Sobari alias Emon yang menyodomi puluhan anak-anak di bawah umur yang korbannya mencapai 110 anak. Kasus Yuyun yang diperkosa berujung dengan pembunuhan yang dilakukan secara beramai-ramai oleh 14 remaja dan anak di bawah umur mengejutkan benak publik. Kasus Yuyun, AK, Emon merupakan salah satu dari jutaan kasus kejahatan seksual terhadap anak yang muncul dipermukaan. Banyak

⁷Ivo Noviana, "Child Sexual Abuse: Impact and Hendling," *Sosio Informa Vol. 01, No. 1, (Januari-April, Tahun 2015)*, h.15-16.
<http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/viewFile/87/55>. (Diakses 26 April 2016).

yang menganggap sikap orang tua dan lingkungan yang terlalu permisif mendorong kian brutalnya kejahatan remaja dan anak-anak. Benarkah hipotesa tersebut, apakah memang instrument liga pencegahan dan penindakan terhadap kriminalitas remaja dan anak kurang tegas dan kurang efektif memberikan efek jera. Semakin meningkatnya kasus kejahatan seksual yang terjadi pada anak membuktikan bahwa sanksi yang berlaku saat ini belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan tidak mampu memutus mata rantai kejahatan yang sangat mengerikan tersebut.

Erlinda Ketua Devisi Sosialisasi KPAI mengatakan bahwa KPAI saat ini sedang menangani banyak kasus. Kasus-kasus yang ditangani sekarang motifnya hampir sama. Hak anak sering terabaikan, jika kasus tersebut tidak dalam pengawasan lembaga atau terlepas dari media. Kasus tersebut kadang tidak berjalan dan tidak diutus tuntas. Kasus Yuyun di Bengkulu yang sangat mengiris hati, jaksa penuntut umum menuntut hanya 10 tahun. Undang-Undang perlindungan anak tentang pasal pencabulan ataupun perkosaan minimal hukuman 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun. Ada dua hal disini, yaitu pelaku dewasa dan pelaku anak. Pelaku anak hanya menggunakan sistem peradilan pidana anak. Artinya, hukuman maksimal 15 tahun untuk pemerkosaan. Pelaku anak dalam kasus pemerkosaan atau pembunuhan, ada sistemnya sendiri atau peradilannya sendiri yaitu sistem peradilan pidana anak. Dalam kasus Yuyun juga terdapat pelaku dewasa. Pelaku dewasa inilah yang harus dihukum maksimal dan KPAI meminta hukuman seumur hidup. Maraknya kasus kejahatan seksual merupakan dampak dari kurangnya peran keluarga dalam membentuk karakter anak. Keluarga tidak berfungsi sebagai orang tua yang memberikan pendidikan, mendampingi maupun mengawasi anak-anaknya. Anak-anak yang melakukan kejahatan merupakan korban dari tontonan film pornografi,

minuman keras, yang akan membuatnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral.

Kriminologi UI Romany Sihite, kejahatan seksual yang terjadi pada Yuyun merupakan akumulasi semua bentuk kejahatan, diperkosa, dibunuh dan akhirnya dibuang. Pelaku pemerkosaan dan pembunuhan Yuyun tidak seketika melakukan hal tersebut, tetapi mereka telah melakukan berbagai tindakan yang anti sosial. Indikasinya yaitu mabuk-mabukan dan menonton film pornografi. Jadi akses tersebut yang lebih besar pengaruhnya untuk meningkatkan perilaku-prilaku yang agresifitas. Selain itu, tontonan yang hampir setiap hari diberitakan di media mengenai kejahatan seksual yang akan menurun ke anak-anak karena anak-anak selalu mengimitasi orang dewasa, misalnya melalui media atau realitas sosial yang tidak pernah terlepas dari kekerasan-kekerasan yang biasa disebut permisif terhadap kekerasan. Hal tersebut yang akan memicu anak-anak lebih agresif lagi melakukan kejahatan. Keluarga harus diberdayakan sesuai dengan fungsinya yang harus memiliki kontrol dan pencegahan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise menilai kasus kejahatan seksual merupakan fenomena gunung es. Banyak hal yang terselubung yang susah untuk dikeluarkan atau diumumkan ke publik. Kebanyakan pelaku merupakan korban-korban kejahatan seksual yang kemudian menjadi pelaku.⁸ Pemberatan hukuman sangat diperlukan guna menekan semakin banyaknya korban yang berjatuh. Revisi UU Nomor 23 Tahun 2002, juga akan menambahkan lama hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tidak hanya kebiri, tapi sudah ada hukuman yang dipersiapkan, yakni hukuman 20

⁸“Darurat Kejahatan Seksual Remaja & Anak: Prime News” (Liputan), 20 April 2016.

tahun, hukuman mati, dan bahkan hukuman seumur hidup. Revisi Undang-undang ini diharapkan menjadi efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.⁹

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, mengatakan Pemerintah masih terus memproses draf rancangan hukuman kebiri bagi pelaku paedofil. Presiden sangat serius menanggapi kejahatan seksual yang semakin marak terjadi dan memerintahkan setiap kementerian lembaga untuk melakukan langkah-langkah antisipatif dari apa yang pernah terjadi maupun kedepannya. Hal yang terkait dengan perlindungan anak sangat banyak. Bagaimana tanggung jawab orang tua, yang dalam hal UU Perlindungan anak menyebutkan bahwa tanggung jawab utama ada di tangan orang tua. Kemudian struktur di bawahnya, ada regulasi tetapi ada struktur yang harus bisa memberikan support terhadap upaya perlindungan anak. Dengan koordinator Perppu adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kapolri, dan Jaksa Agung. Pemberatan hukuman kebiri nantinya tidak akan diterapkan pada semua paedofil. Ada kriteria serta klasifikasi pelaku kejahatan yang pantas dapat tambahan hukuman kebiri. Dengan kata lain, hakim akan memiliki pertimbangan sendiri sehingga pelaku kejahatan akan dikenai pemberatan hukuman dengan kebiri atau tidak. Jadi ada posisi seperti apa dan kualifikasi seperti apa untuk memberikannya. Kebiri bukan hanya sebagai hukuman, namun juga proses pengobatan bagi para pelaku yang sadar dengan kelainannya. Wacana kebiri menimbulkan pro kontra di berbagai kalangan. Lepas dari pro kontra yang berkembang di masyarakat, Khofifah memastikan tujuan pemberian hukuman kebiri itu guna melindungi anak bangsa dari

⁹Andi Dahrul Mahfud Muchtar, "Pemerintah Genjot Hukuman Kebiri Disahkan", Rakyatku News 03 Juni 2016, <http://news.rakyatku.com/read/7750/2016/06/03/yohanna-pemerintah-genjot-hukuman-kebiri-disahkan> (20 Juli 2016).

kejahatan seksual. Sudah jadi tugas negara untuk melindungi anak bangsanya dari kejahatan seksual yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi korban.¹⁰

Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, mengatakan berkaitan dengan perlindungan anak dari kejahatan seksual maka payung hukumnya akan segera dikeluarkan perrpu. Dan yang akan masuk dalam perrpu yaitu pemberatan hukuman dimana berkaitan dengan pemberian hukuman pokok yang maksimal bisa menjadi 20 tahun. Kemudian akan ada hukuman tambahan yaitu hukuman kebiri dan dipasang chip kepada pelaku agar dapat dipantau. Kemudian publikasi identitas dan pemberian hukuman sosial dimana hal-hal itu merupakan keputusan atau komitmen Presiden dan pemerintah bahwa tindak pelaku kekerasan terhadap anak adalah kejahatan yang luar biasa dan mengutuk tindakan tersebut yang membuat pemerintah harus segera mengeluarkan hukuman yang mampu memberi efek jera.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, mengatakan pengebiran nantinya akan dilakukan secara kimiawi, namun teknisnya masih dibahas oleh pemerintah. Hukuman kebiri dapat diberikan pada waktu pelaku di dalam maupun sebelum keluar penjara. Sebelum keluar, pelaku juga akan dipasang chip untuk pemantauan. Hal tersebut diputuskan oleh hakim melihat fakta yang bersangkutan. Teknis pengebiran akan dijelaskan dari pihak kedokteran.

Kadiv Humas Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar, mengatakan bahwa setelah presiden menyatakan kejahatan seksual anak sebagai kejahatan luar biasa yang kemudian akan melahirkan perrpu sebagai salah satu agenda pemerintah yang

¹⁰Arga Sumantri, "Pemerintah Terus Godok Perppu Kebiri: Metrotvnews.com, 08 Noveber 2015, <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/11/08/448615/pemerintah-terus-godok-perppu-kebiri> (20 Juli 2016).

diprioritaskan. Dalam hal ini titik beratnya adalah peningkatan kualitas sistem penghukuman dimana ada sistem hukuman pokok dan hukuman tambahan yang pelaksanaannya tetap melalui suatu sistem peradilan pidana yang berlaku di Negara kita. Sistem penjatuhan hukuman inilah yang nantinya jika dari hasil penilaian hakim, maka apabila terdakwa dinilai berbahaya, memiliki potensi untuk melakukan kejahatan kembali maka hukuman tambahan itulah yang menjadi salah satu solusi yang dapat diberikan kepada terdakwa/terpidana. Antara lain dengan kebiri dan pemasangan chip kemudian publikasi yang luas terhadap yang bersangkutan. Dalam pemasangan chip akan ada tim teknis tersendiri yang mempersiapkan yang harus dibicarakan dengan kementrian yang terkait. Hukuman tambahan akan dilakukan setelah ada amar putusan dari hakim.¹¹

C. Dampak Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Tindak kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan pada dasarnya merupakan dua bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran atas kesusilaan yang dikutuk semua pihak. Namun ironisnya, peristiwa tersebut terus terjadi dari waktu ke waktu dan dapat menimpa siapa pun tanpa terkecuali. Perkosaan pada dasarnya adalah salah satu bentuk dari tindak kekerasan terhadap perempuan yang tergolong paling berat. Dengan kata lain, tindak perkosaan sesungguhnya adalah puncak dari tindak pelecehan seksual yang paling mengerikan yang membuat perempuan sangat takut. Tindak perkosaan menimbulkan luka traumatik yang benar-benar mendalam. Dalam berbagai kasus perkosaan, pelaku bukan hanya melakukan penganiayaan seksual, tetapi sering juga diikuti dengan berbagai tindak kejahatan lain, seperti membunuh korbannya setelah melampiaskan nafsunya untuk menghilangkan jejak.

¹¹“Presiden Jokowi Terbitkan Perrpu Kebiri Untuk Pelaku Pemerkosaan Kebiri Untuk Pemerkosa” (Kabar Petang), 12 Mei 2016.

Jika korban perkosaan adalah anak-anak, maka kemungkinan mereka akan mengalami trauma akut yang jauh lebih besar dibanding orang dewasa. Masa depannya akan hancur dan bagi anak yang tidak bisa menanggung beban, pilihan satu-satunya ialah bunuh diri. Sering kali, perempuan korban perkosaan menderita *dispareunia*, yaitu rasa nyeri atau sakit yang dirasakan sebagai penderitaan bila dilakukan senggama.

Menurut Rahma Sugihartati, sesungguhnya penderitaan yang harus ditanggung korban perkosaan bukan sekedar kesakitan secara fisik, tetapi campur aduk antara perasaan terhina, ketakutan, dan siksaan batin yang tak berkesudahan. Banyak kasus membuktikan, bahwa korban perkosaan dalam kehidupannya akan cenderung mengalami penderitaan “rangkap tiga”, yaitu pada saat kejadian, diperiksa penyidik, dan menjadi pemberitaan di media massa. Seorang korban yang melapor ke polisi, sudah tentu ia akan ditanya berkali-kali berkaitan dengan peristiwa yang dialaminya. Bahkan si korban akan dipojokkan oleh aparat yang memeriksa dengan alasan agar benar-benar dapat diungkap kejadian yang sebenarnya. Setelah diperiksa polisi, korban akan kembali ditanya di sidang pengadilan, sehingga pada titik tertentu korban justru seperti yang menjadi terdakwa. Seorang perempuan atau anak-anak yang lugu tentunya akan sangat menderita dan malu terlebih jika mereka menjadi kerumuman oleh para wartawan yang ingin meliputnya.

Secara medis, setelah memperoleh perawatan fisik, barangkali penderitaan fisik dan trauma fisiologik korban akan dapat disembuhkan. Orang lain pun mungkin sudah lupa pada peristiwa itu. Namun diluar semua itu, aib, depresi, dan penderitaan niscaya akan tetap menghantui korban sepanjang hidupnya. Bagi seorang anak hilangnya keperawanan, stigma masyarakat, dan perasaan was-was serta tercemar

ibaratnya adalah benalu yang selalu kuat melekat dan menghantui perasaan korban. Di sisi lain, ancaman terhadap jiwa korban dan penganiayaan saat berlangsung perkosaan sering kali akan menyentuh *basic trust* korban, sehingga jangan heran jika kemudian timbul perasaan intrapsikis tentang kehancuran yang kronik. Banyak korban perkosaan, setelah kejadian akan menjadi mudah curiga, tidak mudah percaya kepada laki-laki dan merasa terasingkan dari lingkungannya.¹²

Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya mempermalukan nama keluarga. Dampak pelecehan seksual yang terjadi ditandai dengan adanya *powerlessness*, dimana korban merasa tidak berdaya dan tersiksa ketika mengungkapkan peristiwa pelecehan seksual tersebut.

Tindakan kekerasan seksual pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban kekerasan seksual mengalami stress, depresi, goncangan jiwa, adanya perasaan bersalah dan

¹²Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, h. 235-237.

menyalahkan diri sendiri, rasa takut berhubungan dengan orang lain, bayangan kejadian dimana anak menerima kekerasan seksual, mimpi buruk, insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, tempat, kunjungan dokter, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, kecanduan, keinginan bunuh diri, keluhan somatik, dan kehamilan yang tidak diinginkan.

Selain itu, muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca-trauma stress disorder, kecemasan, penyakit jiwa lain termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk reviktimisasi di masa dewasa, *bulimia nervosa*, bahkan adanya cedera fisik kepada anak (Levitan et al, 2003; Messman-Moore, Terri Patricia, 2000; Dinwiddie et al, 2000). Secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, luka di tubuh akibat perkosaan dengan kekerasan, kehamilan yang tidak diinginkan dan lainnya. Sedangkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga adalah bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua.

Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak secepatnya ditangani oleh ahlinya. Anak yang mendapat kekerasan seksual, dampak jangka pendeknya akan mengalami mimpi-mimpi buruk, ketakutan yang berlebihan pada orang lain, dan konsentrasi menurun yang akhirnya akan berdampak pada kesehatan. Jangka panjangnya, ketika dewasa nanti dia akan mengalami fobia pada hubungan seks atau bahkan yang parahnya lagi dia akan terbiasa dengan kekerasan

sebelum melakukan hubungan seksual. Bisa juga setelah menjadi dewasa, anak tersebut akan mengikuti apa yang dilakukan kepadanya semasa kecilnya.

Sementara itu, Weber dan Smith mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidakberdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya.

Selain itu, kebanyakan anak yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria *psychological disorder* yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD), dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Menurut Beitch-man et.al (Tower, 2002), anak yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain.

Finkelhor dan Browne (Tower, 2002) mengkategorikan empat jenis dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, yaitu:

1. Pengkhianatan (*Betrayal*). Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak, mempunyai kepercayaan kepada orangtua dan kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.
2. Trauma secara Seksual (*Traumatic sexualization*). Russel (Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban

kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (Tower, 2002) mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

3. Merasa Tidak Berdaya (*Powerlessness*). Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya (Finkelhor dan Browne, Briere dalam Tower, 2002).
4. *Stigmatization*. Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Anak sebagai korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obat-obatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut (Gelinas, Kinzl dan Biebl dalam Tower, 2002).

Secara fisik memang mungkin tidak ada hal yang harus dipermasalahkan pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual, tapi secara psikis bisa menimbulkan ketagihan, trauma, pelampiasan dendam dan lain-lain. Apa yang menimpa mereka

akan mempengaruhi kematangan dan kemandirian hidup anak di masa depan, caranya melihat dunia serta masa depannya secara umum.¹³

D. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Dewasa ini, persoalan anak kian kompleks. Segmentasi masalah anak juga beragam, mulai anak korban kekerasan, anak yang diperdagangkan, anak yang dipekerjakan, dieksploitasi, sampai anak yang harus menghadapi nasib perih karena mereka harus menghadapi seorang guru yang galak dan keras kepala di tempat belajar. Ironisnya, sampai saat ini empati semua komponen masyarakat untuk ikut serta menangani masalah anak dapat dihitung jari. Peran ormas-keagamaan juga belum optimal, atau bahkan belum menjadi prioritas, tenggelam dibandingkan respon mereka dengan isu-isu sosial-politik lainnya.¹⁴

Perlindungan terhadap anak korban kekerasan merupakan fenomena sosial yang memerlukan perhatian semua pihak. Dalam kasus yang akhir-akhir ini terjadi, mulai dari penganiayaan yang cukup mendasar tentang bagaimana perlindungan yang bisa diberikan terhadap anak-anak dari berbagai kejahatan yang terjadi. Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik maupun mental serta sosialnya.

Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu

¹³Ivo Noviana, "Child Sexual Abuse: Impact and Handling," *Sosio Informa Vol. 01, No. 1*, (Januari - April, Tahun 2015), h. 15-16.
<http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/viewFile/87/55>. (Diakses 26 April 2016).

¹⁴Abdul Rahman, *Perlindungan hukum & Pemenuhan Hak Konstitusional Anak*, (Cet. I: Makassar; Alauddin University Press, 2011), h. 208.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Dalam undang-undang tersebut, terhadap anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak yang tidak dapat diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orang tua.

Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 1997 yang diharapkan dapat membantu anak yang berada dalam proses hukum, tetap untuk mendapatkan hak-haknya. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (2) dijelaskan pengertian mengenai perlindungan anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak anak meliputi:

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

Pelaksanaan perlindungan anak agar nantinya perlindungan terhadap anak dapat efektif, nasional positif, bertanggung jawab dan bermanfaat haruslah memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- 1) Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksanakannya perlindungan anak harus mempunyai pengertian-pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Perlindungan anak harus dilakukan bersama antara setiap warga Negara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama dan kepentingan nasional.
- 3) Kerjasama dan kordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat antara para partisipan yang bersangkutan.
- 4) Perlunya diusahakan inventarisasi faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak.
- 5) Harus dicegah adanya penyalahgunaan kekuasaan, mencari kesempatan yang menguntungkan dirinya sendiri dalam membuat ketentuan yang mengatur masalah perlindungan anak.
- 6) Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
- 7) Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak, pihak anak harus diberikan kemampuan dan kesempatan untuk ikut serta melindungi diri sendiri dan kelak dikemudian hari dapat menjadi orang tua yang berperan aktif dalam kegiatan perlindungan anak.
- 8) Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada pihak yang bersangkutan dan oleh karena adanya menimbulkan penderitaan, kerugian pada para partisipan tertentu.

- 9) Perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya.¹⁵

Ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan/kekerasan terhadap anak diatur dalam pasal 81 ayat (1) UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yaitu:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukakn kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).¹⁶

Meskipun Undang- undang telah mengatur tentang perlindungan anak, namun faktanya kejahatan seksual masih terus terus terjadi dimana-mana bahkan telah memasuki kategori *Extra Ordinary Crime*. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan terobosan baru untuk menekan angka kejahatan seksual yaitu dengan mengeluarkan perppu dengan hukuman tambahan yaitu hukuman kebiri. Hukuman kebiri sebagai suatu usulan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, perempuan, dan kelompok rentan lainnya. Sebab hukuman kebiri dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan dan calon pelaku yang berprotensi melakukan kejahatan dan kekerasan seksual. Namun, alat untuk menyelesaikan permasalahan sosial tidak cukup bila dilakukan dengan solusi hanya memberikan hukuman kebiri. Sehingga pertimbangan pemberlakuan hukuman kebiri mesti dilakukan secara komphrensif dengan melihat pada aspek medis, serta hak asasi terhadap pelaku dan korban. Hukuman kebiri harus dikaji terlebih dahulu mengenai bentuk dan sifat hukuman.¹⁷

¹⁵Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Cet. I: Makassar; Alauddin University Press, 2012), h. 189-192.

¹⁶ Kitab Undang-undang Hukum Pidana

¹⁷"Hukuman Kebiri Sebagai Penghukuman atau Rehabilitasi", *hukum online.com* 06 November 2015. <http://www.m.hukumonline.com/berita/baca/hukuman-kebiri-sebagai-penghukuman-atau-rehabilitasi>. (20 juli 2016).

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN HUKUMAN KEBIRI

A. Dasar Hukum

Terkait maraknya kasus-kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual yang mengemuka ke permukaan, hukuman kebiri muncul sebagai upaya memotong siklus kejahatan seksual. Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.

Menghilangkan fungsi testis dapat dilakukan dalam dua cara, yakni dengan membuang testis ataupun melalui kebiri secara kimiawi. Akibat dari kebiri adalah pria akan menjadi mandul, serta dorongan seksualnya akan hilang. Islam tidak membenarkan pengebirian terhadap manusia berdasarkan beberapa hadis berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو
مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَخْتَصِمِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ
أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ.¹

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Aun Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Isma'il dari Qais dari 'Abdullah radliallahu 'anhu dia berkata; Kami pernah berperang bersama Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam namun tidak mengikut sertakan istri-istri kami, lalu kami berkata: Wahai Rasulullah, tidakkah kami dikebiri? Namun Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam melarang kami melakukannya. tapi setelah itu beliau memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi wanita. lalu beliau membacakan ayat; Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa

¹Muhammad bin Ismail bin Abu Abdillah al-Bukha bin al-Ju'fi *al-Jami*, Juz VI (Bairut: Dar Ibn Kašir, 1987 M), h. 53.

yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي رَجُلٌ شَابُّ قَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي الْعَنَتَ وَلَا أَجِدُ طَوْلاً أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ أَفَأَخْتَصِمِي فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَ ثَلَاثًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لَاقٍ فَأَخْتَصِمِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ دَعُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَوْزَاعِيُّ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنَ الزُّهْرِيِّ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَدْ رَوَاهُ يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ.²

Artinya:

Telah mengkhabarkan kepada kami Yahya bin Musa, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Anas bin 'Iyadh, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Al Auza'i dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bahwa Abu Hurairah berkata; saya berkata; wahai Rasulullah sesungguhnya aku seorang pemuda yang takut dosa atas diriku, dan aku tidak mendapatkan kemampuan untuk menikahi wanita, bolehkah aku mengebiri? Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berpaling darinya hingga ia mengatakan hal itu sebanyak tiga kali, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Abu Hurairah pena telah mengering dengan apa yang akan engkau temui, maka kebirilah karena itu atau tinggalkan, " Abu Abdurrahman berkata; Auza'i tidak mendengar hadits ini dari Az Zuhri, dan hadits ini adalah shohih dan telah diriwayatkan Yunus dari Zuhri.

Syariah Islam telah menetapkan hukuman untuk pelaku pedofilia yang melakukan tindakan pencabulan dan pemerkosaan sesuai rincian fakta perbuatannya, sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis hukuman di luar ketentuan syariah Islam itu. Dalil haramnya melaksanakan hukum-hukum non syariah adalah firman Allah swt. QS al-Ahzab/33: 36

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

Terjemahannya:

²Abu'Abd al-Rahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali al-Khurasani, *al-Sunan al-Saghir al-Nasa'i*, Juz VI (Cet. II; Halb: Maktab al-Maṭbu'ah al-Islamiyah, 1406 H/1986 M), h. 59.

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.”³

B. Pandangan Ulama dan Pakar Hukum

Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis, dasar perlakuan hukuman kebiri atau kastrasi bagi pedofilia bisa merujuk pada aspek pemberian efek jera bagi pelaku dan memberi rasa takut untuk melakukannya bagi pelaku lain. Tidak semua kejahatan langsung ditentukan hukumnya dalam Islam kecuali pembunuhan dan perzinahan. Maka, hal lainnya bisa dikembalikan pada kebijakan hakim atau pemerintah untuk berijtihad tentang hukuman atas kejahatan itu. Dalam Islam, belum ada pemerintahan Islam yang melakukan kebiri atau kastrasi. Namun, bukan berarti sesuatu yang dilarang. Dari pendekatan pelaku, hukuman kebiri bisa sebagai alternative untuk memberi aspek jera dan mengantisipasi perbuatan tersebut menimpa orang lain. Namun, kebiri bukan menjadi penyelesaian masalah secara utuh karena tetap membutuhkan pendekatan keagamaan bagi pelaku dan korban. Hal ini dikarenakan pedofilia bukan penyakit kelamin atau karena dorongan seksual belaka, tetapi juga berkaitan dengan pikiran dan penyakit kejiwaan. Bisa jadi, organ seksualnya tidak berfungsi, tetapi pikiran kejahatannya tetap ada dan bisa melakukan kejahatan seksual lain dengan organ tubuh lain. Karena itu, solusi lain adalah pemerintah perlu menggiatkan lebih lanjut tentang pendidikan agama, memberikan lebih baik pendidikan seksualitas dan pendampingan secara psikologis.

³Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 423.

Ketua Robithoh Ma'ahid al-Islamiy (RMI), asosiasi pondok pesantren Nahdlatul Ulama, Reza Ahmad Zahid mengatakan wacana menghidupkan kembali hukuman kebiri kepada pelaku perkosaan tidak akan mengubah sikap ulama untuk menentang. Sebab, Islam tidak mengatur soal kebiri. Ketentuan Islam yaitu, melindungi setiap umat manusia untuk memiliki keturunan. Hak yang telah diberikan Tuhan tersebut tidak bisa dihilangkan oleh manusia dengan alasan apapun. Pemerintah memang memiliki otoritas membuat dan memberlakukan hukum positif atas pelaku kejahatan. Namun penyusunan tersebut tetap harus memperhatikan kaidah hukum agama dan tidak boleh menabraknya.

Syaikh Ibn Hajar mengatakan bahwa, kebiri itu haram bagi umat manusia karena mengandung banyak sekali bahaya, menyiksa diri, sangat rentan menimbulkan efek mematikan, membuang maskulinitas seorang pria, merubah ciptaan Allah, dan tidak mensyukuri nikmat karena ke-‘pria’-an pria merupakan nikmat yang agung. Dalam kitab-kitab Fiqh Syafi’I dijelaskan secara rinci tentang kebiri dan hukumnya. Kebiri didefinisikan sebagai tindakan membuang dua buah testis, baik kantungnya ikut dipotong atau tidak. Adapun hukum kebiri adalah haram kecuali ketika memenuhi tiga syarat. Pertama, dilakukan pada hewan yang halal dikonsumsi. Kedua, dilakukan saat masih berumur muda. Ketiga, dilakukan pada waktu yang tepat sehingga tidak membahayakan binatang yang dikebiri. Dari sini dapat dipahami bahwa mengebiri manusia hukumnya haram secara mutlak.⁴

Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin, menilai sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

⁴Zaqy Dafa, “Hukuman Kebiri: Benarkah Solusi yang Tepat”, *IslamPos*. <https://www.islampos.com/276495-276495/> (20 Juli 2016).

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tengah digodok menjadi Undang-undang (UU). Selain merendahkan martabat manusia, Perppu ini juga sudah ditolak oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang akan ditugaskan sebagai eksekutor hukuman kebiri. Perppu itu sebaiknya ditolak oleh DPR, karena bisa dinilai merendahkan martabat kemanusiaan yang bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi IDI sebagai organisasi kedokteran sudah menyatakan bahwa hukuman kebiri itu termasuk hukuman badan zaman jahiliyah sehingga ini merendahkan martabat kemanusiaan yang diharamkan oleh konstitusi. Penolakan tersebut didasarkan atas fatwa Majelis Kehormatan dan Etik Kedokteran (MKEK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kebiri Kimia dan juga didasarkan pada Sumpah Dokter serta Kode Etik Kodekteran Indonesia (Kodeki). IDI juga menyatakan bahwa, atas dasar keilmuan dan bukti-bukti ilmiah, kebiri kimia tidak menjamin hilang atau berkurangnya hasrat serta potensi perilaku kekerasan seksual pelaku. Kebiri bukanlah solusi yang efektif untuk menghukum pelaku kejahatan seksual.⁵

Pakar hukum pidana dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau yang disebut Perppu Kebiri yang telah disetujui Presiden Jokowi itu berlebihan dan emosional. Hukuman kebiri pun dianggap tidak perlu, sebab UU lama saja sebenarnya sudah cukup baik. Sanksi yang diberikan pada pelaku kejahatan itu yakni selama 15 tahun sudah cukup lama. Pemberian hukuman pada pelaku kejahatan pun seharusnya diadakan diskusi dahulu dengan Mahkamah

⁵Srihandriatmo Malau, "Perppu Kebiri Sebaiknya Ditolak DPR", *Tribunnews.com* 14 Juni 2016, <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/06/14/pakar-hukum-tatanegara-perppu-kebiri-sebaiknya-ditolak-dpr> (20 Juli 2016).

Agung agar ganjaran yang diterima pelaku di pengadilan itu bisa dijatuhi hukuman yang serius. Jika itu dilaksanakan, tentu para pelaku kejahatan pun bisa dihukum berat.⁶

Pakar hukum Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Unair, Herlambang P Wiratraman menyatakan hukuman kebiri itu bukan hukuman yang bisa mengubah perilaku kejahatan sosial. Yang namanya proses menghukum itu, perlu kita lihat dari berbagai aspek. Seperti, bagaimana proses hukuman yang berjalan itu bisa mengembalikan marwah sosial. Selain itu, dijatuhkannya proses hukuman tak hanya melihat kondisi dari si pelaku, tapi juga dikaitkan dengan realitas si pelaku. Ketika menjatuhkan hukuman, lihat sekelilingnya yang terlibat. Misalnya, keluarga pelaku dan Negara pun juga ikut terlibat. Jadi, jangan sampai menjadikan hukuman ini kebal terhadap hukum sehingga proses hukuman kebiri untuk si pelaku kekerasan seksual ini merupakan hukuman sepihak. Perlu adanya koreksi di kursi pemerintah, apakah kejadian ini sudah menjamur atau menjadi tradisi di negara itu. Bukan hanya memikirkan soal hukumannya, tapi pengaruh sosialnya juga. Pemasungan saja sudah tidak diperbolehkan. Untuk masalah kejahatan seksual, yang harus diperbaiki oleh sistem hukum di Indonesia ialah tiga pilar yakni, struktur instansi pemerintah, lalu etika dalam masyarakat, serta adanya pelajaran atau mata kuliah tentang ajaran keadilan.⁷

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakkir, mengatakan hukuman kebiri tidak dikenal dalam Hukum Islam. Dalam

⁶Intelijen, “Pakar Hukum Pidana Kritik Jokowi Terkait Perppu Kebiri”, <https://www.intelijen.co.id/pakar-hukum-pidana-kritik-jokowi-terkait-perppu-kebiri/> (20 Juli 2016).

⁷Sugiyarto, “Wacana Hukuman Kebiri Ditentang Pakar Hukum”, *Tribunnews.com* 21 Oktober 2015, <http://www.tribunnews.com/regional/2015/10/21/wacana-hukuman-kebiri-ditentang-pakar-hukum?page=2> (20 Juli 2016).

kajian ilmu Hukum Islam yang membahas tentang kriminalitas (jinayat), tidak ada penyebutan hukuman kebiri. Di dalam nash (suatu lafaz yang tidak mungkin mengandung pengertian lain selain yang ditunjukkan oleh lafaz itu), yang ada hanya hukuman cambuk. Cambuk memberikan hukuman pada fisik yang mampu memberi ingatan pada pelaku agar tidak melakukan kejahatan seksual lagi. Kebiri sama saja dengan mematikan sesuatu yang merupakan bekal hidup manusia. Mematikan hasrat keinginan seksual tidak dikenal dalam Islam. Kebiri bukan hanya mematikan hasrat seksual pelaku, tapi juga membuat orang tersebut tidak memiliki semangat. Sementara dengan adanya cambukan, pelaku akan merasa kesakitan namun tetap memiliki semangat hidup. Dalam Islam, perbuatan zina adalah kejahatan yang sangat berat. Apalagi jika zina tersebut disertai dengan adanya penyimpangan hasrat seksual. Artinya, ada dua kejahatan yang diperbuatnya. Zina hukumannya berat apalagi dilakukan lewat perkosaan, maka hukumannya harus lebih berat. Kekerasan seksual terhadap anak bisa dikatakan sebagai kejahatan luar biasa.

Di Indonesia, tidak ada hukum yang melarang hubungan seksual kecuali hukum agama. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ditujukan untuk orang yang sama-sama suka melakukan hubungan seksual meski bukan pasangan suami istri. Alhasil, jika terjadi pemerkosaan, maka yang dilarang adalah tindakan kekerasannya. Sebaliknya, dalam hukum Islam keduanya dilarang baik hubungan seksual (yang bukan muhrim) apalagi tindak kekerasannya. Apabila pemerintah menyiapkan hukuman, maka hendaknya mencari faktor penyebab terjadinya penyimpangan seksual.⁸

⁸Qommarria, "Kebiri Tidak Dikenal dalam Hukum Islam", *Republika.co.id* 27 Mei 2016, http://googleweblight.com/?lite_url=http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/05/27/o7u331377-guru-besar-fh-iii-sebut-kebiri-tak-dikenal-dalam-hukum-islam&ei=QaffKhkt&Ic=id-ID&S=1&m=454&host=www.google.co.id&ts (20 Juli 2016).

Pakar hukum pidana, Asep Iwan Iriawan sepakat terhadap rencana pemerintah soal penerapan hukuman kebiri bagi pelaku paedofil. Menurut dia, hukuman kebiri juga telah diterapkan di beberapa Negara. Dan itu bukan hal yang dilarang atau haram. Kebiri juga tidak melanggar HAM, menghilangkan libido itu bukan menghilangkan HAM.⁹

Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia (UII), Ari Wibowo mengatakan hukuman tambahan berupa kebiri kepada pelaku kekerasan seksual, terbukti dapat menekan angka pengulangan kejahatan seksual, terutama kepada anak. Jenis hukuman kebiri yang diterapkan untuk seseorang residivis atau orang yang sudah melakukan delik pengulangan, itulah yang diterapkan di Indonesia. Namun tidak hanya itu yang menjadi pertimbangannya. Bagi yang bukan residivis, bisa dikenakan hukuman kebiri bila melihat dampaknya yang besar terhadap korban. Di beberapa Negara ada dua model. Ada yang menjadikan kebiri sebagai punishment atau hukuman, tapi ada juga kebiri sebagai treatment atau perawatan. Konsekuensinya, ketika menjadikan kebiri sebagai treatment, maka tidak termasuk bagian untuk memberikan efek jera., tapi bertujuan pemulihan atau rehabilitasi bagi pelaku. Karena syaratnya rumit, Indonesia cenderung menjadikan kebiri sebagai punishment. Walaupun difungsikan sebagai hukuman tambahan, kebiri yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, tidak hanya semata-mata untuk memberikan efek jera, namun ada upaya rehabilitasi kepada pelaku. Jadi kebiri dilakukan bersama

⁹Arga Sumantri, "Pakar Hukum Sepakat Soal Hukuman Kebiri", MetroTvnews.com27 Februari 2016, <http://internasional.metrotvnews.com/read/2013/09/22/183273/puluhan-tewas-dalam-baku-tembak-di-mal-kenya> (20 Juli 2016).

rehabilitasi. Dalam pengaturan perppu Perlindungan Anak, pidana kebiri tidak wajib diterapkan.¹⁰

C. Telaah Rancangan Perpu Kebiri

Pemerintah telah menetapkan kejahatan seksual terhadap anak sebagai kejahatan luar biasa. Pasalnya, kejahatan itu dapat mengancam dan membahayakan jiwa anak. Karena itu, dalam Perppu No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, diatur mengenai pidana pemberatan, pidana tambahan, dan tindakan lain bagi pelaku. Presiden Jokowi menyatakan pemberatan pidana berupa tambahan pidana sepertiga dari ancaman penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun. Selain itu, ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati pun masuk ke pemberatan pidana. Sedangkan untuk tambahan pidana alternatif yang diatur ialah pengumuman identitas pelaku, kebiri kimia, dan pemasangan alat deteksi elektronik. Presiden mengatakan, penambahan pasal akan memberi ruang bagi hakim untuk memutuskan hukuman seberat-beratnya agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku.¹¹

Rancangan Perppu yang merupakan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual ada dua pasal dari UU No.23 Tahun 2002 yang dianulir melalui rancangan Perppu tersebut, yakni pasal 81 dan pasal 82. Keduanya merupakan pasal-pasal yang mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dan tindakan cabul terhadap anak. Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 mengatur ancaman pidana bagi setiap

¹⁰Wilujeng Kharisma, "Kebiri Bisa Tekan Angka Kekerasan Seksual", *Pikiran Rakyat.com* 1 Juni 2016, http://www.googleweblight.com/?lite_url=http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/06/01/pakar-hukum-kebiri-bisa-tekan-angka-kekerasan-seksual (20 Juli 2016).

¹¹Nanang Sutisna, "Jokowi Berlakukan Hukuman Kebiri", *Tempo.co* 26 Mei 2016, https://googleweblight.com/?lite_url=https://m.tempo.co/read/news/2016/05/26/063774151/jokoewi-berlakukan-hukuman-kebiri-begini-cara-eksekusinya&ei=Lj1eHxPk&Ic (20 Juli 2016).

orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan. Ancaman ini tidak hanya berlaku bagi orang yang memaksa melakukan persetubuhan dengan anak, tetapi juga membuat anak bersetubuh dengan orang lain. Hukuman pidana penjara yang bisa dijera paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun. Selain itu, diancam pula dengan denda Rp300 juta dan paling sedikit Rp60 juta. Sementara itu, di dalam rancangan Perppu tidak diatur mengenai ancaman denda minimal. Sedangkan denda maksimal dinaikkan menjadi 5 miliar. Adapun pidana penjara paling lama tidak ada perbedaan, sedangkan pidana penjara paling singkat dinaikkan menjadi 10 tahun. Pemberatan hukuman di dalam rancangan Perppu juga berlaku bagi pelaku perbuatan cabul terhadap anak. Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 mengatur bahwa setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, bisa dipenjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun. Selain itu, dapat pula dikenakan denda paling banyak Rp300 juta dan paling sedikit Rp60 juta. Di dalam rancangan perppu, ancaman pidana paling singkat bertambah menjadi 5 tahun. Sedangkan ancaman pidana penjara paling lama tidak akan ada perubahan. Sementara itu, ancaman denda minimal juga tidak diatur seperti perubahan pada pasal 81. Akan tetapi, denda maksimal bertambah menjadi paling banyak Rp5 miliar.

Selain memperberat hukuman penjara dan denda, rancangan Perppu juga mengatur pemberatan, baik bagi pelaku kekerasan seksual maupun perbuatan cabul terhadap anak. Pemberatan ini diberikan 1/3 dari ancaman pidana pokok. Adapun orang-orang yang terancam dengan pemberatan hukuman adalah orangtua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan yang melakukan pidana tersebut.

Selain itu, pemberatan hukuman juga diatur untuk pidana yang menimbulkan akibat tertentu. Secara limitative, disebutkan akibat-akibat yang menimbulkan pemberatan hukuman bagi pelaku. Akibat tersebut adalah jika menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan korban meninggal dunia. Pelaku yang menimbulkan akibat yang diatur tersebut diancam dengan pemberatan 1/3 dari ancaman pidana pokok. Tidak hanya itu, pelaku juga diancam dengan pidana tambahan. Tidak lain pidana tambahan yang ditentukan adalah kebiri kimia.

Menurut penjelasan rancangan Perppu, yang dimaksud dengan kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimiawi antiandrogen ke dalam tubuh pelaku. Cara yang ditempuh bisa melalui suntikan atau meminumkan pil khusus yang bertujuan memperlemah hormone testosterone orang yang bersangkutan. Secara lebih detail, rancangan Perppu mengatur bahwa ancaman pidana tambahan berupa kebiri kimia paling lama sesuai dengan pidana pokok yang dijatuhkan. Diputus bersamaan dengan putusan akhir dan dilaksanakan bersamaan dengan pidana pokok. Namun, pidana tambahan ini dikecualikan bagi pelaku anak. Pelaksanaan pidana kebiri kimia tidak sembarangan. Pidana tambahan ini harus dilakukan oleh tenaga medis yang ditunjuk pemerintah sesuai dengan standar dan prosedur. Pelaksanaannya di bawah pengawasan secara berkala dari Kementerian Kesehatan.¹²

Berdasarkan situasi dan kondisi Indonesia sekarang ini yang sangat memprihatinkan karena semakin maraknya kasus kejahatan seksual terhadap anak, penulis setuju dengan pemberlakuan hukuman kebiri dengan mengedepankan aspek

¹²“Begini Isi Rancangan Perppu Kebiri”, *Situs Resmi Hukum Online.com*. <http://www.m.hukumonline.com/berita/baca/It573d6e8e285c6/begini-isi-rancangan-perpp-kebiri> (20 Juli 2016).

masalah ketika hukuman itu diterapkan. Karena kasus ini menyangkut masa depan anak-anak penerus bangsa, maka perlu ada penindakan yang lebih serius sebelum kondisinya semakin parah. Jangan hanya karena masalah HAM sehingga hukuman kebiri tidak boleh diterapkan. Kita harus memperhatikan kondisi kejiwaan korban bahkan sampai meregang nyawa. Keadilan harus didapatkan oleh korban, jadi dengan penerapan hukuman kebiri diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku. Hakim diharapkan dapat berijtihad dalam memberikan hukuman yang sesuai dengan kasus tersebut dengan pertimbangan efek jera dan memberikan pelajaran bagi yang lainnya.

D. Telaah Hukum Islam Terhadap Manfaat dan Mudharat Hukuman Kebiri

Wacana hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual merupakan tindakan yang sangat reaktif. Kalau dikaji ulang, mengapa sekarang begitu banyak kasus pelecehan seksual, inilah seharusnya yang menjadi pertanyaan besar bagi pemerintah, jika sudah ada permasalahan yang kompleks berarti masyarakat Indonesia tengah sakit kemerosotan moral, kejahatan seksual yang pada dasarnya dipicu oleh hasrat dan dorongan seks yang memuncak. Hasrat dan dorongan seks ini lahir dari naluri seksual yang ada pada diri manusia. Naluri ini sebenarnya merupakan fitrah dalam diri manusia, yang bisa terangsang lalu menuntut dipenuhi. Rangsangan muncul karena dua faktor. Pertama, pemikiran termasuk fantasi dan khayalan. Kedua, fakta bagi masing-masing pria dan wanita. Harus diakui di era globalisasi Negara tidak berperan menyaring segala bentuk informasi yang mampu merusak pemikiran masyarakat, industri perfilman dan hiburan bisa masuk tanpa adanya sensor, otomatis corak masyarakat yang bebas, dalam bentuk pakaian maupun pergaulan. Hal demikian mampu mendorong nafsu seseorang terjerumus ke dalam kemaksiatan,

maka dari itu kebiri bukan solusi. Pemerintah harus memastikan apakah hukuman kebiri tersebut bisa merusak fisik manusia secara permanen atau tidak.¹³



¹³“Mengkritisi Hukuman Kebiri dalam Perspektif Islam” *Visi Islam.net* 23 Oktober 2015, <http://www.visimuslim.net/2015/10/mengkritisi-hukuman-kebiri-dalam.html> (20 Juli 2016).

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

1. Hukuman kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) adalah tindakan bedah atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia.
2. Kejahatan seksual terhadap anak sudah masuk kategori kejahatan luar biasa atau disebut *Extra Ordinary Crime*. Hukum yang berlaku sekarang yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum mampu menekan dan memberi efek jera terhadap para pelaku kejahatan. Karena keadaan yang sangat genting dan mendesak tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (perppu) untuk menghukum pelaku kejahatan seksual anak dengan cara dikebiri agar dapat member efek jera terhadap para pelaku agar tidak mengulangi perbuatan kejinya.
3. Hukuman Kebiri yang akan diterapkan yaitu hukuman kebiri kimiawi. Proses kebiri dapat dilakukan saat pelaku berada dalam penjara maupun akan keluar dari balik jeruji besi. Sementara itu, untuk pemasangan chip akan dilakukan saat dia di dalam maupun sebelum keluar untuk pemantauan. Mengenai teknis pelaksanaan hukuman kebiri masih dalam tahap pembahasan.

B. Implikasi Penelitian

Harapan peneliti agar skripsi ini menjadi bahan kecil dari upaya untuk mengetahui kejahatan seksual terhadap anak dan hukuman kebiri menurut hukum Islam.

Untuk mencegah semakin meningkatnya korban kejahatan seksual terhadap anak, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak baik keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Terutama keluarga yang harus memberikan pendidikan moral dan pendidikan seks sejak dini terhadap anak-anaknya agar dapat terhindar dari perbuatan yang tercela tersebut. Selain itu semua pihak harus mengedepankan kesejahteraan anak karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan diberikan haknya seperti memperoleh pendidikan agar kelak dapat menjadi penerus yang berguna bagi bangsa.

Kepada seluruh kalangan, sebaiknya membantu pemerintah untuk mencegah berbagai macam tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan seksual terhadap anak. Karena segala bentuk kejahatan kesusilaan ini sangat meresahkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvionitasari, Rezki. "Hukuman Kebiri Kimia, Begini Cara Kerja dan Dampaknya", *Tempo.co* 27 Mei 2016, http://googleweblight.com/?lite_url=https://m.tempo.co/read/news/2016/05/27/063334519/hukuman-kebiri-kimia-begini-cara-kerja-dan-dampaknya&ei=Lj eHxPk&Ic=id-ID&s=1&m=454&host=www.google.co.id&ts (20 Juli 2016).
- Armandhanu, Denny. "Kebiri dan Pelaku Kejahatan Seksual di Eropa", *Viva.co.id* 24 Februari 2012. <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/291118-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-di-eropa>. (19 Juli 2016).
- Begini Isi Rancangan Perppu Kebiri", *Situs Resmi Hukum Online.com*. <http://www.m.hukumonline.com/berita/baca/lt573d6e8e285c6/begini-isi-rancangan-perppu-kebiri>
- Dafa, Zaqy. "Hukuman Kebiri: Benarkah Solusi yang Tepat", *IslamPos*. <https://www.islampos.com/276495-276495/> (20 Juli 2016).
- Darurat Kejahatan Seksual Remaja & Anak: Prime News" (Liputan), 20 April 2016. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi IV (cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)
- Di Korea Selatan Pelaku Pemerkosa Dihukum Kebiri" *Vemale.Com* 25 Maret 2013. <http://www.vemale.com/ragam/21074-di-korea-selatan-pelaku-pemerkosa-dihukum-kebiri.html> (19 Juli 2016).
- Firdaus, Rifki. "Hukuman Kebiri dalam Islam", *IslamPos* 18 Mei 2016, <https://www.islampos.com/hukuman-kebiri-dalam-islam-276845/> (22 Mei 2016).
- Hakim, Lukman. "Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur," *Jurnal Equality*, Vol. 13 No 1 (Februari 2008), h. 78-79. [http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18417/1/equ-feb2008-13%20\(2\).pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/18417/1/equ-feb2008-13%20(2).pdf)
- Hasan, Hamzah. *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2012)
- Hizbut Tahrir Indonesia, "Pro Kontra Hukuman Kebiri Dalam Perspektif Syariah Islam", *Situs Resmi Hizbut Tahrir*. <http://hizbut-tahrir.or.id/2015/10/26/pro-kontra-hukuman-kebiri-dalam-perspektif-syariah-islam/> (24 April 2016).
- Hukuman Kebiri di Mata Kak Seto" (Liputan), *Republika*, 31 Oktober 2015. Institute For Criminal Justice Reform, "Menguji Euforia Kebiri", <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/03/Menguji-Euforia-Kebiri.pdf>. (26 April 2016).
- Hukuman Kebiri Sebagai Penghukuman atau Rehabilitasi", *hukum online.com* 06 November 2015. <http://www.m.hukumonline.com/berita/baca/hukuman-kebiri-sebagai-penghukuman-atau-rehabilitasi>. (20 juli 2016).
- Intelijen, "Pakar Hukum Pidana Kritik Jokowi Terkait Perppu Kebiri", <https://www.intelijen.co.id/pakar-hukum-pidana-kritik-jokowi-terkait-perppu-kebiri/> (20 Juli 2016).
- Kamsinah, *Problematika Remaja & Pendidikan Seksual*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2011)

- Kanang, Abdul Rahman. *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014)
- Kebiri Menanti Predator Anak: Debat Pro Kontra Hukuman Kebiri Penjahat Anak” (Liputan), 20 April 2016.
- Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1989)
- Kharisma, Wilujeng. “Kebiri Bisa Tekan Angka Kekerasan Seksual”, *Pikiran Rakyat.com* 1 Juni 2016, http://www.googleweblight.com/?lite_url=http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2016/06/01/pakar-hukum-kebiri-bisa-tekan-angka-kekerasan-seksual (20 Juli 2016).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Komisi Perlindungan Anak, “KPAI: “Kasus Kekerasan Terhadap Anak Semakin Meningkat”, *Situs Resmi KPAI*. www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-kekerasan-terhadap-anak-meningkat/#/ (10 Mei 2016).
- Komisi Perlindungan Anak, “KPAI: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa”, *Situs Resmi KPAI*. www.kpai.go.id/berita/kpai-kasus-kekerasan-terhadap-anak-meningkat/#/ (10 Mei 2016).
- Kristian Erdianto, “Bagaimana Penerapan Hukuman Kebiri”, *Kompas.com* 26 Mei 2016, <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/26/18093221/bagaimana-penerapan.hukuman.kebiri.ini.penjelasan.pemerintah> (20 Juli).
- Malau, Srihandriatmo. “Perppu Kebiri Sebaiknya Ditolak DPR”, *Tribunnews.com* 14 Juni 2016, <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/06/14/pakar-hukum-tatanegara-perppu-kebiri-sebaiknya-ditolak-dpr> (20 Juli 2016).
- Mantra, Ida Bagoes. *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*,
- Media Indonesia, “Kasus Yuyun Picu Kesadaran RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”, *Situs Resmi Media Indonesia*. <http://www.mediaindonesia.com/news/read/43682/yuyun-pdan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual/2016-05-03/> (10 Mei 2016).
- Mengkritisi Hukuman Kebiri dalam Perspektif Islam” *Visi Islam.net* 23 Oktober 2015, <http://www.visimuslim.net/2015/10/mengkritisi-hukuman-kebiri-dalam.html> (20 Juli 2016).
- Muchtar Andi Dahrul Mahfud. “Pemerintah Genjot Hukuman Kebiri Disahkan”, *Rakyatku News* 03 Juni 2016, <http://news.rakyatku.com/read/7750/2016/06/03/yohanna-pemerintah-genjot-hukuman-kebiri-disahkan> (20 Juli 2016).
- Noviana, Ivo. “Child Sexual Abuse: Impact and Hendling,” *Sosio Informa Vol. 01, No. 1, (Januari - April, Tahun 2015)*, h. 15-16. <http://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/viewFile/87/55>. (Diakses 26 April 2016).
- Pasal 1 KUHP Tentang Perlindungan Anak
- Pengertian Kebiri” (Suara News), Go A Head Challenge (19 Juli 2016).
- Poskota News, “Kejahatan Seks Hantui Anak, Pemerintah dan DPR Abai”, *Situs resmi Poskota News*. <http://poskotanews.com/2016/05/06/kejahatan-seks-hantui-anak-pemerintah-dan-dpr-abai/> (11 Mei 2016).
- Prabowo, Danang. “Indonesia Darurat Kejahatan Seksual”, *Radio Republik Indonesia*, 4 Mei 2016.

- Presiden Jokowi Terbitkan Perrpu Kebiri Untuk Pelaku Pemerkosaan Kebiri Untuk Pemerkosa” (Kabar Petang), 12 Mei 2016.
- Qommarria, “Kebiri Tidak Dikenal dalam Hukum Islam”, *Republika.co.id* 27 Mei 2016,
http://googleweblight.com/?lite_url=http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/05/27/o7u331377-guru-besar-fh-iii-sebut-kebiri-tak-dikenal-dalam-hukum-islam&ei=QaffKhkt&Ic=id-ID&S=1&m=454&host=www.google.co.id&ts (20 Juli 2016).
- Ramadhani, Mutia. “Begini Cara Rusia Terapkan Kebiri Kimia untuk Pedofil”, *Republika Online* 13 Oktober 2015.
<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/15/10/13/nw4z3e328-begini-cara-rusia-terapkan-kebiri-kimia-untuk-pedofil> (19 Juli 2016).
- Safary, Any. “Pengertian Kebiri dan Hukumnya”,
<http://sikpas.blogspot.co.id/2016/05/pengertian-kebiri-dan-hukumannya.html> (19 Juli 2016).
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Langkah Pemerintah Memperberat Hukuman Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak”, *Situs Resmi Setkab*.<http://setkab.go.id/inilah-langkah-pemerintah-memperberat-hukuman-pelaku-kejahatan-seksual-terhadap-anak/> (11 Mei 2016).
- Soal Pro-Kontra Hukum Kebiri” (Liputan), *Republika*, 30 Oktober 2015.
- Sugiyarto, “Wacana Hukuman Kebiri Ditentang Pakar Hukum”, *Tribunnews.com* 21 Oktober 2015,
<http://www.tribunnews.com/regional/2015/10/21/wacana-hukuman-kebiri-ditentang-pakar-hukum?page=2> (20 Juli 2016).
- Sumantri Aрга. “Pakar Hukum Sepakat Soal Hukuman Kebiri”, *MetroTvnews.com* 27 Februari 2016,
<http://internasional.metrotvnews.com/read/2013/09/22/183273/puluhan-tewas-dalam-baku-tembak-di-mal-kenya> (20 Juli 2016).
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian* (Jakarta: CV. Rajawali, 1983)
- Sutisna, Nanang. “Jokowi Berlakukan Hukuman Kebiri”, *Tempo.co* 26 Mei 2016,
https://googleweblight.com/?lite_url=https://m.tempo.co/read/news/2016/05/26/063774151/jokoewi-berlakukan-hukuman-kebiri-begini-cara-eksekusinya&ei=Lj1eHxPk&Ic (20 Juli 2016).
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Turangan, Lily. “Dua Cara Hukuman Kebiri Dilakukan”, *Kompas.Com* 19 Juli 2016.
<http://health.kompas.com/read/2016/05/16/190700023/Dua.Cara.Hukum.Kebiri.Dilakukan> (19 Juli 2016).
- Wardah, Fathiyah. “Pemerintah Masih Pertimbangkan Bentuk Hukuman Kebiri untuk Kejahatan Seksual Terhadap Anak”, *Voice Of America*.
<http://www.voaindonesia.com/content/pemerintah-masih-pertimbangkan-bentuk-hukuman-kebiri/3031658.html> (18 April 2016).
- Warta Informasi Berita (WartaInfo), “Hukuman Kebiri Kimia dan Fisik”. *Situs Resmi WartaInfo*. <https://www.wartainfo.com/2016/05/hukuman-kebiri-kimia-dan-fisik-serta-efeknya-itu-apa.html> (19 Juli 2016).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)

ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	;	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (`).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	a	A
اِ	Kasrah	i	I
اُ	ḍammah	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ	fathah dan yā ^ʾ	ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كيف : kaifa

هول : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ... / اَ....	Fathah dan alif atau yā ^ʾ	ā	a dan garis di atas
اِ	Kasrah dan yā	ī	i dan garis di atas
اُ	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā'* marbūṭah ada dua yaitu: *tā'* marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *tā'* marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'* marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'* marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

روضة الاطفال : rauḍah al-aṭṭāl

المدينة الفاضلة : al-madīnah al-faḍilah

الحكمة : rauḍah al-aṭṭāl

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

ربنا : rabbanā

نجينا : najjainā

الحق : al-ḥaqq

نعم : nu”ima

عدو : ‘duwwun

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

علي : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عربي : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشمس : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزلاية : al-zalalah (az-zalalah)

الفلسفة : al-falsafah

البلاد : al- bilādu

7. *Hamzah.*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تامرون : ta'murūna

النوع : al-nau'

شيء : syai'un

امرت : umirtu

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafẓ al-jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاِلهِ دِيْنِ اللهِ dīnullāh billāh

Adapun *tā'* marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t). contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl


Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan:
Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū).

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:



swt.	: subḥānahū wa ta'ālā
saw.	: ṣallallāhu 'alaihi wa sallam
a.s.	: 'alaihi al-salām
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
l.	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	: Wafat tahun
QS.../...: 4	: QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama A. ZAQIAH SAUDI, Lahir di Sinjai, Tanggal 25 Maret 1994, tempat tinggalnya di, Jln. Persatuan Raya Tondong, Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Penulis adalah anak keempat dari enam bersaudara pasangan A. SAUDI MOERI S.pd dan Almh. A. MARTA S.pd, MM.. Penulis menempuh jenjang pendidikan dimulai dari pendidikan SDN 28 Pakkita (2001-2006), kemudian melanjutkan pendidikan di SMP 1 Sinjai Timur (2007-2009). Setelah itu penulis lanjut di SMAN 1 Sinjai Timur (2010-2012), kemudian berlabuh di kampus peradaban dan lulus pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Alauddin Makassar (2012-2016).

